

SKRIPSI

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN
MUTU LAYANAN PENDIDIKAN
(STUDI KASUS DI SMKN 4 MAJENE)**



OLEH:

MIRNA

19.1900.055

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN
MUTU LAYANAN PENDIDIKAN
(STUDI KASUS DI SMKN 4 MAJENE)**



OLEH:

**MIRNA
NIM : 19.1900.055**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan (studi kasus di SMKN 4 Majene)

Nama Mahasiswa : Mirna

NIM : 19.1900.055

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Tarbiyah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah
Nomor : 2721 Tahun 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Drs. Ismail Latif, M.M

NIP : 196312071987031003

Pembimbing Pendamping : Humaeroah, M.Pd

NIND : 2021089101

()
()

Mengetahui
Dekan Fakultas Tarbiyah,

Dewi Zulfah, M.Pd.
NIP. 19830420 200801 2 010



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan (studi kasus di SMKN 4 Majene)

Nama Mahasiswa : Mirna

NIM : 19.1900.055

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Tarbiyah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah
Nomor : 2721 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 24 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Drs. Ismail Latif, M.M	(Ketua)	(.....)
Humaeroah, M.Pd	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Abd. Halik, M.Pd.I	(Anggota)	(.....)
Muh. Alwi, M.Pd	(Anggota)	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Tarbiyah,

Humaeroah, M.Pd.
NIP. 19830420 200801 2 010



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmatnya berupa petunjuk, kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda tercinta Dahlan dan ibunda tercinta Darna yang merupakan kedua orang tua penulis, karena dengan pembinaan dan berkah do'a tulusnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada dosen pembimbing Bapak Drs. Ismail Latif, M.M sebagai pembimbing I dan Ibu Humaeroah, M.Pd sebagai pembimbing II atas bimbingan dan arahnya selama ini, penulis ucapkan terimakasih juga kepada Bapak Dr. Abd. Halik, M.Pd dan Bapak Muh. Alwi, M.Pd selaku penguji dan telah memberikan banyak masukan dan arahan dalam penulis skripsi ini dan juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Zulfah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah atas pengabdian dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Abd. Halik, M.Pd ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis dan penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak/ibu selaku dosen program studi Manajemen Pendidikan Islam yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik penulis melakukan studi di IAIN Parepare
5. Kepala perpustakaan dan seluruh jajarannya yang telah memberikan izin dan membantu dalam mencari referensi skripsi ini.
6. Para staf Fakultas Tarbiyah yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuan.
7. Kepala sekolah SMKN 4 Majene serta seluruh guru dan tenaga kependidikan sekolah yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan penelitian ini.
8. Begitupun ucapan terima kasih saya kepada teman-teman mahasiswa terkhusus 8 orang sahabat-sahabat saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, yang tak pernah berhenti memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih pula kepada seluruh teman seperjuangan MPI Angkatan 19 karena Alhamdulillah telah mampu melalui setiap tahap, hingga bisa menulis dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Parepare, 5 Juni 2023M
16 Dzulqa'dah 1444 H

Penulis,



Mirna
NIM. 19.1900.055

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Mirna
NIM : 19.1900.055
Tempat/Tgl. Lahir : Onang, 01 Oktober 2001
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah
Judul Skripsi : Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan (Studi Kasus di SMKN 4 Majene)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagai atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 5 Juni 2023M
16 Dzulqa'dah 1444 H

Penulis,


Mirna
NIM. 19.1900.055

ABSTRAK

Mirna, 19.1900.055 dengan judul skripsi *Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan (Studi Kasus di SMKN 4 Majene)* (dibimbing oleh Ismail Latif dan Humaeroah)

Berbicara tentang pendidikan tak akan luput dengan masalah pembiayaan. Pada masa ini pembiayaan menjadi salah satu permasalahan yang tidak dapat dihindarkan, karena pada dasarnya untuk mendapatkan sesuatu akan membutuhkan biaya tanpa adanya sebuah biaya, proses jalannya pendidikan akan terhambat. Untuk menghasilkan *output* yang berkualitas maka diperlukan pengelolaan biaya. Manajemen pembiayaan pada proses pendidikan yang berkualitas karena didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Seiring perkembangan zaman, lembaga pendidikan berusaha memperbaiki kualitas layanan di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan tentang kegiatan perencanaan pembiayaan (*budgeting*), 2) pelaksanaan pembiayaan pendidikan (*actuating*) 3) pengawasan pembiayaan pendidikan (*controlling*) di SMKN 4 Majene.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data ini dilakukan dengan mengadakan observasi, melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan bendahara sekolah dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, perencanaan pendidikan merupakan proses mempersiapkan rangkaian keputusan untuk mengambil tindakan yang digambarkan dalam konsep real untuk menjalankan kehidupan sekolah yang akan mendatang dengan pembiayaan yang terprogramkan untuk mencapai tujuan dan menghasilkan desain ideal, hasil perencanaan berupa efisiensi anggaran, pemaksimalan fungsi manajemen dan kebutuhan siswa terakomodir. *Kedua*, pelaksanaan pembiayaan pendidikan sebagai proses implementasi pendidikan melibatkan pelaksana bertindak sesuai dengan petunjuk teknis dan teknis BOS, Pelaksanaan pembiayaan pendidikan dilakukan dengan mengoptimalkan besarnya anggaran pembiayaan agar tidak terjadi peminjaman dari pihak eksternal dan dapat menghasilkan hasil yang maksimal. *Ketiga*, pengawasan pembiayaan pendidikan berfungsi memonitoring seluruh aktifitas penggunaan pembiayaan anggaran pendidikan, mencegah terjadinya kesalahan, dan mencegah penyimpangan. *Keempat*, mutu pendidikan menjadi sasaran pertama dan utama masyarakat atau pihak pelanggan karena pemenuhan sarana penunjang pendidikan serta pembelajaran yang tuntutannya semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam yang akhirnya menjadi perhatian bagi setiap lembaga pendidikan.

Kata kunci : Manajemen pembiayaan, Mutu pendidikan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	8
1. Manajemen Pembiayaan Pendidikan	8
2. Mutu Pendidikan	23
3. Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan	35
C. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Metode Penelitian	39

B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C.	Fokus penelitian.....	40
D.	Jenis dan Sumber Data.....	41
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
F.	Uji Keabsahan Data.....	44
G.	Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
B.	Hasil Penelitian.....	51
1.	Perencanaan Pembiayaan (<i>budgeting</i>) dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di SMKN 4 Majene.....	51
2.	Pelaksanaan (<i>actuating</i>) pembiayaan pendidikan di SMKN 4 Majene dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.....	54
3.	Pengawasan (<i>controlling</i>) pembiayaan pendidikan di SMKN 4 Majene dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan.....	60
4.	Mutu Layanan Pendidikan di SMKN 4 Majene.....	63
C.	Pembahasan.....	63
1.	Perencanaan pembiayaan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMK Negeri 4 Majene.....	64
2.	Pelaksanaan (<i>actuating</i>) Pembiayaan Pendidikan di SMKN 4 Majene dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan.....	65
3.	Pengawasan (<i>controlling</i>) Pembiayaan Pendidikan di SMKN 4 Majene dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan.....	66
4.	Mutu Layanan Pendidikan di SMKN 4 Majene.....	66
BAB V	PENUTUP.....	68
A.	Kesimpulan.....	68
B.	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	I

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data tenaga pendidik PNS tahun 2023	50
4.2	Data tenaga pendidik non PNS tahun 2023	51
4.3	Data tenaga administrasi PNS 2023	51
4.4	Data tenaga administrasi non PNS 2023	52
4.5	Data peserta didik 2023	52

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagian Kerangka Pikir	38



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Pedoman wawancara	IV
2.	Transkrip wawancara	VI
3.	Surat rekomendasi penelitian	XIII
4.	Surat izin melaksanakan penelitian	XIV
5.	Surat selesai meneliti	XV
6.	Surat keterangan wawancara	XVI
7.	Dokumentasi	XVIII
8.	Biodata penulis	XX

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak ditimbangan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ئُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
يِي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
وُو	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاذِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : al-haqq

الْحَجُّ : al-hajj

نُعْمٌ : nu‘im

عُدُّوْا : ‘aduwwun

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau*

شَيْءٌ: *syai'un*

أمرت: *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului pertikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau kedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِالله : *billah* دِينُ اللهِ : *Dīnullah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ Hum fī rahmatillāh

1. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu).

*Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd
(bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū).*

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al- sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

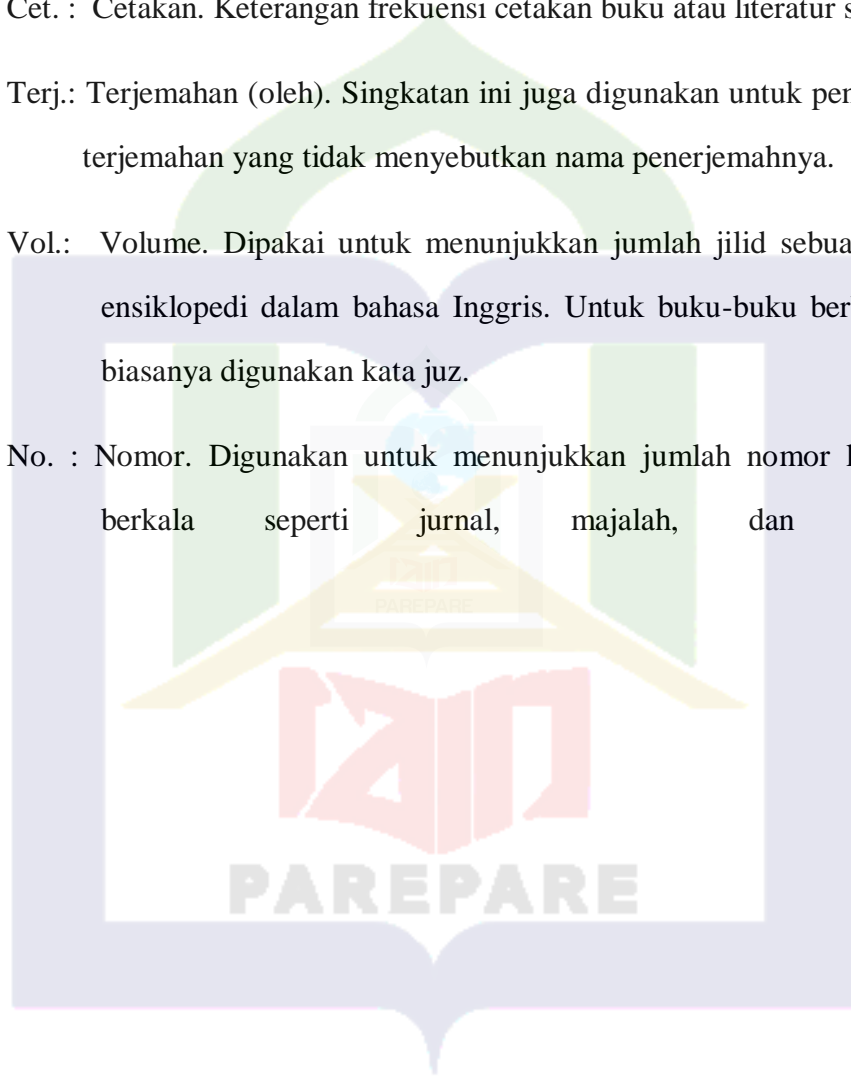
et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Semenjak diberlakukannya 8 standar Nasional Pendidikan yang meliputi, standar pengelolaan, standar isi, standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar pembiayaan, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar penilaian, yang diberlakukan pemerintah, maka setiap sekolah atau madrasah harus berbenah memenuhi delapan standar tersebut, agar dapat eksis dan diakui keberadaannya.

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara jernih pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia, pemerintah tidak merupakan satu sistem yang lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan yang tidak terpisahkan dalam perannya untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan.¹

Dalam konteks permasalahannya, pembiayaan pendidikan memang sangat mahal dengan asumsi jika diinginkan sebuah sekolah atau madrasah yang berkualitas maka harus didukung dengan kesejahteraan pendidik dan tenaga pendidikan, peningkatan profesionalisme, dana operasional yang cukup dan kenyamanan bagi kegiatan pembelajaran peserta didik dan fasilitas yang lengkap, hal ini akan terwujud apabila ditunjang dengan anggaran yang memadai, sehingga dapat menopang proses pembelajaran yang maksimal dengan harapan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas.²

¹ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung:RemajaRosdakarya, 2000), h. 77

²Kisbiyanto, *Pengektifan Manajemen Pendidikan, Elementry*, Vol 2, No. 1 (2014) 144.

Fenomena biaya pendidikan acapkali menimbulkan hal yang problematik. Dari satu sisi, orang lain mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, namun pada sisi yang lain kita dihadapkan dengan biaya pendidikan tidak terjangkau semua orang alias mahal. Fenomena lain menunjukkan, lembaga pendidikan dengan biaya juga berhasil menaikkan mutu pendidikannya dengan raihan akreditasi yang memuaskan. Dalam konteks ini, orang beranggapan bahwa, “biaya pendidikan tinggi, kualitas pendidikan akan baik”, karena ada realitas empirik yang ditemui di sejumlah lembaga pendidikan.

Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggung jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Hal ini penting terutama terutama dalam rangka MBS, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dan sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu dihadapkan pada keterbatasan dana.

Perlu diakui bahwa pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia yang akan memberikan sumbangan terhadap pembangunan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap, dan produktivitas. Jika pendidikan ditempatkan pada posisi upaya untuk mencerdaskan bangsa dalam konteks madani, maka diperlukan keberanian investasi yang besar untuk sistem pendidikan nasional. Sementara itu, pendidikan nasional dihadapkan pada masalah antara lain peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia dan belum terpenuhinya sumber daya dari masyarakat secara profesional sesuai dengan prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua.

Pendidikan sebagai instrumen fundamental bagi peradaban manusia memiliki sistem yang kompleks dan terencana serta terprogram dengan pembiayaan dan penyelenggaraannya. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara rakyat dan pemerintah serta masyarakat untuk mencetak sumber daya manusia yang terdidik guna tercapainya kemajuan pada suatu pemerintah.

Perencanaan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan, memiliki kedudukan strategis. Adanya perencanaan tersebut akan mengarahkan jalannya pendidikan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Karenanya seorang perencana pendidikan diharuskan mempunyai pengetahuan luas dan kemampuan sehingga dapat rancangan yang disusunnnya akan dapat menjadi pedoman pelaksanaan pendidikan selanjutnya.

Berbicara mengenai pembiayaan berarti ada aspek amanah yang dipertanggung jawabkan untuk disampaikan pihak yang berwenang. Hal ini yang terkandung dalam QS. An-Nisa (4): 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengejaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.³

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa setiap penggunaan dana sekolah yang telah diterima perlu dipertanggungjawabkan pada sumbernya melalui pengelolaan keuangan secara transparansi maupun akuntabilitas. Pertanggung jawaban dilakukan kepada orang tua siswa, masyarakat maupun pemerintah

³ Kementerian Agama RI. *Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu), h. 88.

harus jelas sehingga memudahkan pihak yang berkepentingan mengetahuinya, selain itu juga menciptakan kepercayaan timbal balik kepada pihak terkait.

Nanang Fattah mengutarakan pembiayaan pendidikan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang pengadaan peralatan/mobile, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan.⁴

Pendidikan harus memiliki anggaran tersendiri agar lebih terstruktur pengolahannya. Apabila anggaran sudah memenuhi pada setiap kebutuhan dan fasilitas maka sekolah tersebut akan berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan peserta didik yang unggul serta adanya manajemen pembiayaan dapat meminimalisir kendala-kendala dalam pengelolaan pembiayaan. Dengan demikian pada semua tingkatan penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan merupakan hal yang sangat penting untuk turut menjamin terlaksananya pendidikan. Pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya biaya.

Berdasarkan hasil observasi permasalahan yang terjadi dalam lembaga pendidikan di SMK Negeri 4 Majene terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan antara lain adalah sumber dana terbatas, dan kebijakan sebagaimana tertulis dalam rencana strategis sekolah seperti pembangunan sumber daya manusia dalam hal ini yang dimaksud adalah guru dan tenaga kependidikan. Karena keterbatasan dana pada SMK Negeri 4 Majene mengakibatkan keterbatasan buku untuk kejuruan belum memadai, serta praktek kejuruan belum lengkap sehingga mengakibatkan kurangnya kompetensi dan keahlian siswa pada saat praktek lapangan.

⁴ Nanang Fattah, *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*. h. 23

Hal tersebut menjadi dasar peneliti ingin melakukan penelitian tentang “Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di SMK Negeri 4 Majene”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana penganggaran (*budgeting*) pembiayaan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMK Negeri 4 Majene?
2. Bagaimana pelaksanaan (*accounting*) pembiayaan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMK Negeri 4 Majene?
3. Bagaimana evaluasi (*auditing*) pembiayaan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMK Negeri 4 Majene?
4. Bagaimana mutu layanan pendidikan di SMK Negeri 4 Majene?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai diantaranya sebagai berikut:

1. Menjelaskan penganggaran (*budgeting*) pembiayaan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMK Negeri 4 Majene
2. Menjelaskan pelaksanaan (*accounting*) pembiayaan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMK Negeri 4 Majene
3. Menjelaskan evaluasi (*auditing*) pembiayaan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMK Negeri 4 Majene
4. Menjelaskan mutu layanan pendidikan di SMK Negeri 4 Majene

D. Kegunaan Penelitian

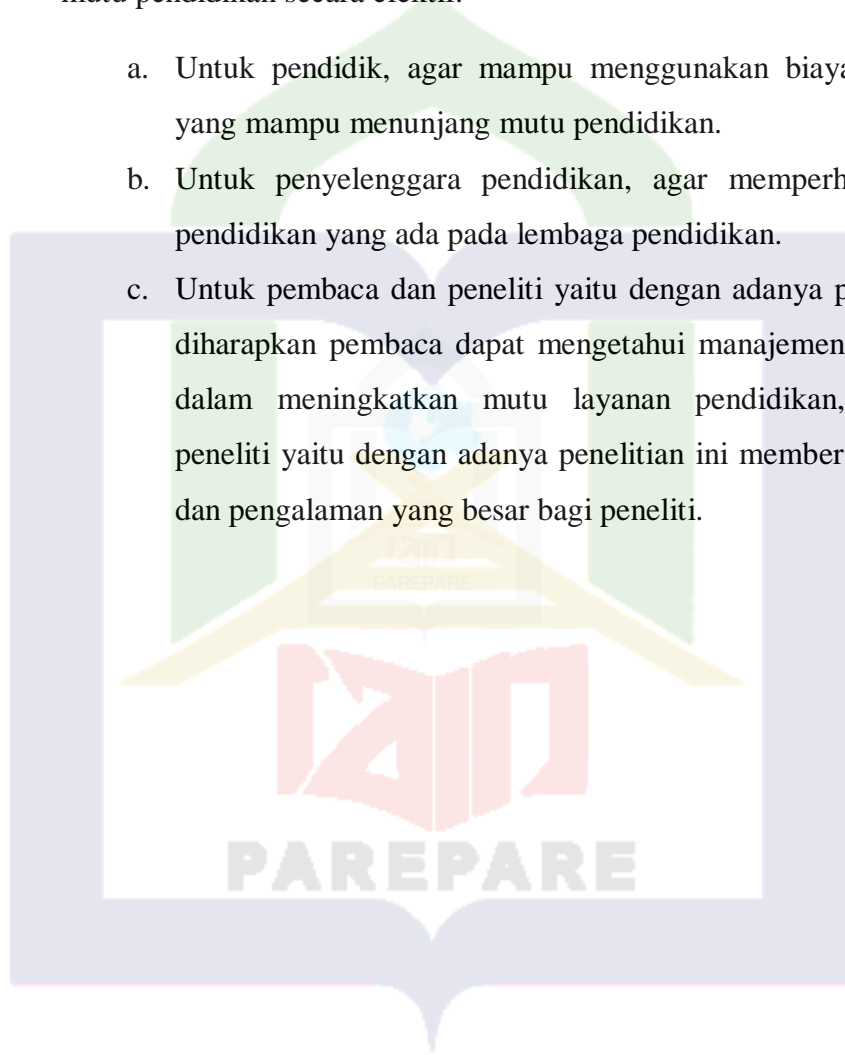
1. Manfaat teoretis

Untuk mengembangkan ilmu dalam bidang garapan manajemen pendidikan Islam yang berhubungan dengan manajemen pembiayaan pendidikan dan kaitannya dengan mutu pendidikan.

2. Manfaat praktis

Untuk kepala sekolah, agar sebagai pemimpin dalam suatu lembaga pendidikan ia dapat menganalisis segala kebutuhan dalam suatu sekolah serta melakukan manajemen untuk pembiayaan dan peningkatan mutu pendidikan secara efektif.

- a. Untuk pendidik, agar mampu menggunakan biaya pendidikan yang mampu menunjang mutu pendidikan.
- b. Untuk penyelenggara pendidikan, agar memperhatikan mutu pendidikan yang ada pada lembaga pendidikan.
- c. Untuk pembaca dan peneliti yaitu dengan adanya penelitian ini, diharapkan pembaca dapat mengetahui manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan, dan untuk peneliti yaitu dengan adanya penelitian ini memberikan manfaat dan pengalaman yang besar bagi peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pertama, Elvalarani Halimatus Sadiyah (2021), dalam penelitiannya yang berjudul *Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu*.⁵ Dalam fokus penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan manajemen pembiayaan, mendeskripsikan penerapan manajemen pembiayaan, mendeskripsikan evaluasi manajemen pembiayaan, dan mendeskripsikan dampak dari penerapan manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah atau madrasah. Dengan hasil penelitian mengenai manajemen pembiayaan untuk mengembangkan prestasi belajar peserta didik di MAN Kota Batu dilakukan dengan perencanaan, implementasi dan evaluasi.

Kedua, Pipin Destinasi, (2019), dalam penelitiannya yang berjudul *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqin Parung Bogor*⁶. Fokus penelitian ini membahas tentang perencanaan sistem manajemen pembiayaan pendidikan, pelaksanaan sistem pembiayaan pondok pesantren Darul Muttaqin dan evaluasi sistem pembiayaan.

Hal penelitian ini menunjukkan bahwasanya manajemen pembiayaan dalam Pondok Pesantren Darul Muttaqin masih kurang adanya sosialisasi mengenai perangkat yang menunjang sistem manajemen pembiayaan.

Ketiga, Zaini, (2021), dalam penelitiannya yang berjudul *Kreativitas Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada Madrasah Marjinal di Kota Banjarmasin (studi multikasus pada MI Darul Huda Kuin dan MI Al Istiqamah*

⁵Elvalarani Halimatus Sadiyah, “*Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Kota Batu*”, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021

⁶Pipin Destinasi, “*Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqin Parung Bogor Tahun 2019*”. (Jakarta: Institut PTIQ)

Pekapuran). Fokus penelitian ini membahas tentang perencanaan pembiayaan pendidikan, fundrising dana pendidikan, akuntabilitas dana pendidikan di madrasah.

Hasil penelitian manajemen pembiayaan pendidikan pada MI Darul Huda dan MI Al Istiqamah meliputi, perencanaan, pemanfaatan sumber dana, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dana, partisipasi stakeholder madrasah terhadap pembiayaan, akuntabilitas pembiayaan pendidikan.⁷

Berdasarkan kajian dari ketiga hasil penelitian tersebut dapat disarikan bahwa ketiganya lebih menekankan pada tataran keefektifan pembiayaan, pengawasan, akuntansi, pertanggungjawaban perumusan sistem pembiayaan dan kebermanfaatan manajemen pembiayaan, sehingga penulis perlu memaksimalkan fungsi manajemen yang lain dalam pembiayaan pendidikan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan penelitian baru yang berjudul Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di SMKN 4 Majene yang sifatnya akan melengkapi penelitis sebelumnya dan pembaharuan.

B. Tinjauan Teori

1. Manajemen Pembiayaan Pendidikan

a. Definisi Manajemen Pembiayaan

Manajemen adalah “seni dan ilmu pengetahuan, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu”.⁸ Moenir, berpendapat bahwa : “manajemen pada hakekatnya berfungsi untuk

⁷Zaini, tesis. *Kreativitas Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada Madrasah Marjinal di Kota Banjarmasin (studi multikasus MI Darul Kuin dan MI Al Istiqamah Pekapuran Tahun 2021*. (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin)

⁸Manullang, 2008, *Dasar-Dasar Manajemen*, (cct ke V). Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI), hlm. 48.

melakukan semua kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi”.⁹

Ada definisi lain tentang manajemen yang dikemukakan oleh Siagian bahwa “manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang melalui orang-orang lain”.¹⁰

Dari definisi-definisi tersebut diatas, dapat dimengerti bahwa manajemen merupakan suatu proses pencapaian tujuan tertentu pula untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam perencanaan. Dalam perencanaan suatu kegiatan tidak mungkin dikerjakan sendiri-sendiri, tetapi dituntut harus dapat bekerja sama serta adanya unsur-unsur manajemen seperti: manusia, uang, material, mesin, metode dan sebagainya yang diperlukan dalam menggerakkan kegiatan organisasi.

Pembiayaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan interval sistem pendidikan untuk mengelola dana pendidikan dengan efisien. Pembiayaan muncul sebagai input yang digunakan untuk setiap kegiatan pendidikan. Tidak hanya terkait dengan mengetahui ataupun menganalisa sumber dana, melainkan juga bagaimana cara penggunaan dana yang efektif dan efisien. Pembiayaan adalah bagian penting dari proses penyampaian pendidikan untuk meningkatkan kualitasnya. Pembiayaan dan pendanaan adalah komponen penting dari pelaksanaan dan merupakan tidak dapat di pisahkan dengan kajian manajemen.¹¹

Dari beberapa uraian di atas dapat dikatakan bahwa manajemen pembiayaan merupakan sebuah proses dalam mengoptimalkan sumber dana yang ada, mengalokasikan dana yang tersedia dan mendistribusikannya sebagai

⁹ A. Rusdiana & A. Gojin. 2014. *Asas-Asas Manajemen: Berwawasan Global*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 22.

¹⁰ Sondang P. Siagian. 1996. *Manajemen Modern*. Jakarta: Gunung Agung, hlm. 66.

¹¹ Yuniarto Mudjisusatyo et al., “Education Financing Management During the COVID-19 Pandemic at the Madrasah Tsanawiyah Level : Exploration of Alternative Solutions, *Journal of Education, Teaching, and Learning*, 2023.

fasilitas atau sarana pendukung proses pembelajaran sehingga tercipta proses pembelajaran efektif dan efisien.

Oleh karena itu, fokus manajemen pembiayaan pendidikan pada bagaimana sumber dana yang ada mampu dikelola secara profesional sehingga memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.¹²

b. Prinsip dan Fungsi Pembiayaan Pendidikan

Dalam definisi ini ada tiga kata kunci dalam manajemen pendidikan, yaitu optimalisasi sumber dana, alokasi dan distribusi. Tiga kata kunci inilah yang pada akhirnya menjadi fungsi dari pembiayaan pendidikan itu sendiri.

1) Optimalisasi Sumber Dana

Fungsi manajemen pembiayaan adalah bagaimana lembaga pendidikan mampu mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pendidikan yang diperoleh.

2) Alokasi

Alokasi dalam manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses finansial decision. Disinilah kebijakan alokasi pembiayaan pendidikan ditentukan. Kebijakan dalam menentukan alokasi ini harus mengedepankan prioritas dalam sebuah proses pendidikan.

3) Distribusi

Distribusi merupakan proses penyaluran dana sesuai dengan alokasi yang ditentukan.¹³

Terkait dengan fungsi manajemen pembiayaan pendidikan, dikatakan bahwa dana (biaya) memainkan peran penting dalam pendidikan pada tiga area ; *pertama* ekonomi pendidik dalam kaitannya dengan pengeluaran masyarakat secara keseluruhan; *kedua* keuangan sekolah kaitannya kebijakan sekolah untuk

¹² Jaja Jahari dan Amirullah Syarbani. *Manajemen Madrasah Teori, Strategi dan Implementasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta (2013), 73-74.

¹³ Ibid, 74.

menerjemahkan uang terhadap layanan kepada peserta didik dan *ketiga*, pajak administrasi sekolah yang harus diorganisir secara langsung berkaitan dengan tujuan kebijakan. Pusat perhatian mendasar dari ekonomi adalah bagaimana mengalokasikan sumber-sumber terbatas untuk mencapai tujuan yang beraneka ragam mungkin tak terhingga.

Untuk menjalankan fungsi manajemen pembiayaan secara efektif, maka kita harus memerhatikan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengelolaannya. Diantara prinsip manajemen pembiayaan pendidikan adalah :

- 1) Akuntabilitas (*accountability*)
 - 2) Transparan
 - 3) Integritas
 - 4) Konsistensi
 - 5) Efektif dan efisien
- c. Ruang Lingkup Pembiayaan Pendidikan
1. Penganggaran (*Budgeting*)

Penganggaran (*budgeting*) merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu dalam menentukan biaya satuan pendidikan terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro.

Pendekatan makro berdasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Pendekatan mikro berdasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh murid.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penganggaran biaya pendidikan adalah :

- a) Anggaran belanja sekolah harus dapat mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan kebutuhan pendidikan
- b) Merevisi peraturan dan input lain yang relevan, dengan mengembangkan perencanaan sistem yang efektif
- c) Memonitor dan menilai keluaran pendidikan secara terus-menerus dan berkesinambungan sebagai bahan perencanaan tahap berikutnya.

Untuk mengefektifkan pembuatan perencanaan keuangan sekolah, maka yang sangat bertanggung jawab sebagai pelaksana adalah kepala sekolah. Kepala sekolah harus mampu mengembangkan sejumlah dimensi pengembangan administratif.

Dalam hubungan ini adalah penyusunan RKAS memerlukan analisis masalah dan lingkungan ekstern yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

2. Pelaksanaan (*accounting*)

Accounting adalah bahasa yang digunakan untuk menggambarkan hasil kegiatan ekonomi. Dalam pelaksanaan keuangan sekolah dalam garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kegiatan yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik berupa konsep teoretis maupun peraturan pemerintah.

3. Evaluasi (*auditing*)

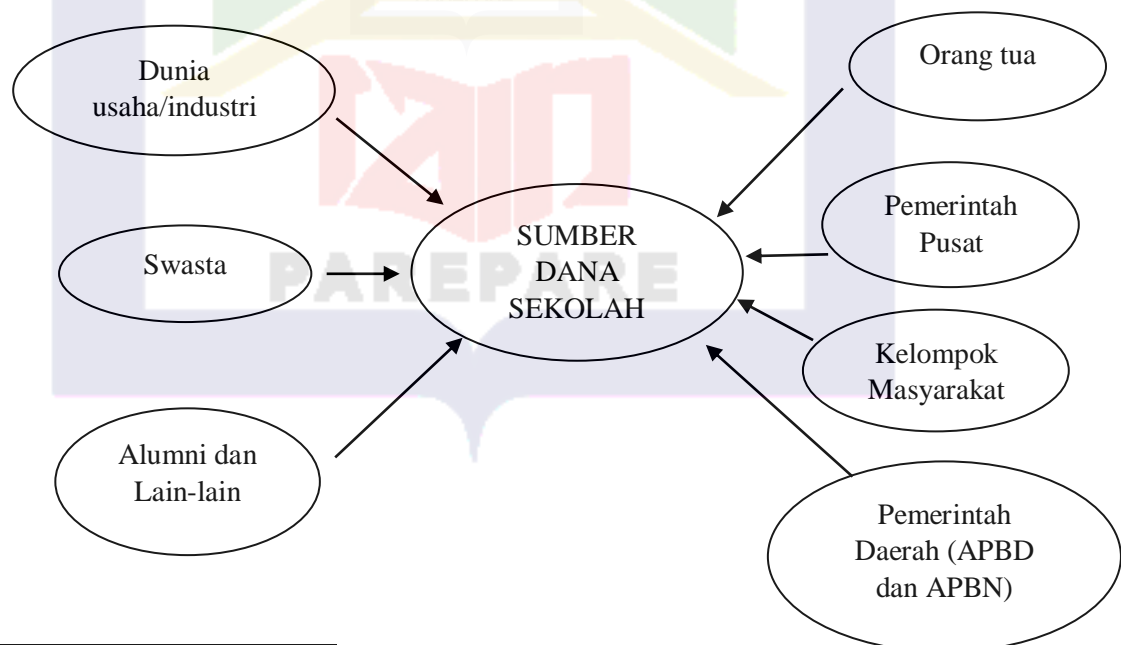
Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat melaporkan

kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam evaluasi keuangan sekolah, evaluasi merupakan salah satu yang harus dilakukan dalam manajemen pembiayaan berbasis sekolah.

d. Sumber-sumber Pembiayaan Pendidikan

Sumber-sumber pembiayaan pendidikan di sekolah menurut Amirin dikategorikan menjadi lima yaitu¹⁴ :

1. Anggaran rutin dan APBN (anggaran pembangunan)
2. Dana penunjang pendidikan (DPP)
3. Bantuan/sumbangan dari BP3
4. Sumbangan dari pemerintah daerah setempat
5. Bantuan lain-lain



¹⁴ Tatang, M. Amirin, dkk. *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta : UNY Press, 2013

Gambar 2.1 Sumber-sumber Dana untuk Sekolah

Untuk terselenggaranya suatu pendidikan, diperlukan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah, orang tua, murid, masyarakat, maupun institusi-institusi lainnya seperti organisasi regional maupun internasional. Pemerintah merupakan penanggung dana terbesar di antara yang lain (sekitar 70%), selanjutnya orang tua murid (sekitar 10-24%) masyarakat (sekitar 5%) dan yang terakhir pihak lain baik yang berbentuk hibah maupun pinjaman.

Menurut Supriadi bahwa Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) mencerminkan kekuatan dalam membiayai penyelenggaraan pendidikannya dan sekaligus menggambarkan rata-rata status sosial ekonomi keluarga para siswa.

RAPBS terdiri atas rencana pendapatan dan rencana pengeluaran atau belanja sekolah. Dalam rencana pengeluaran atau belanja sekolah. Dalam rencana pendapatan, terdapat komponen sumber dana yang berasal dari pemerintah, siswa, dan sumbangan masyarakat lainnya, baik dalam bentuk uang maupun barang. Sementara itu untuk pengeluaran terdapat komponen gaji guru (pegawai) yang biasanya dominan dan non gaji (pemeliharaan, pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti alat peraga, penyelenggaraan proses belajar mengajar, dan kegiatan ekstrakurikuler)¹⁵.

Berdasarkan Peraturan Mendiknas Nomor 19 Tahun 2007, sekolah dewasa ini diharuskan untuk menyusun pedoman pengelolaan dana (investasi dan operasional) yang mengacu pada standar pembiayaan. Pedoman ini mengatur sumber pemasukan, pengeluaran, dan jumlah yang dikelola penyusunan dan pencairan anggaran serta penggalangan dana di luar dana investasi dan operasional. Kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah dalam membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya pembukaan

¹⁵ Efendi Sianturi, dkk, *Bunga Rampai Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Taman-Sidoarjo, Zifatama Jawara, 2020) hlm. 7-8

semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan anggaran untuk dilaporkan kepada komite sekolah serta institusi di atasnya. Pedoman tersebut diputuskan oleh komite sekolah dan harus disetujui oleh institusi di atasnya. Pedoman ini juga harus disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah untuk menjamin tercapainya pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.

Sumber dana sekolah dapat diklasifikasikan kedalam tiga kategori utama: pemerintah (pusat dan daerah), orang tua, peserta didik, dan kelompok masyarakat.

a. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat membantu keuangan sekolah melalui beberapa cara, antara lain mencakup sebagai berikut.

1. Hibah (grant) dan dana bantuan biaya operasional kepada sekolah.
 2. Membayar gaji guru
 3. Membantu sekolah untuk mengadakan proyek penggalangan dana dengan menyediakan bantuan teknis termasuk bahan dan perlengkapan, serta
 4. Ikut mendanai pembangunan dan rehabilitasi bangunan sekolah.
- Pemerintah juga melakukan kontribusi tidak langsung kepada sekolah. Misalnya, melalui pelatihan kepala sekolah dan guru, menyiapkan silabus dan bahan, serta melakukan pengawasan.

b. Pemerintah Daerah

Di negara kita, urusan pendidikan dasar dan menengah dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membangun sekolah, membayar gaji guru, menyediakan sarana fisik, fasilitas ruang kelas, dan peralatan kantor sekolah dengan dana yang berasal dari APBD dan APBN. Daerah memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi, akan memiliki peluang

lebih besar untuk membantu pemenuhan kebutuhan dana penyelenggaraan sekolah.¹⁶

c. Orang Tua Peserta didik

Kontribusi orang tua kemungkinan merupakan keharusan karena pemerintah belum mampu mendanai seluruh kebutuhan dasar dana sekolah. Hal ini umumnya terjadi di negara-negara berkembang seperti negara kita. Namun, di negara maju yang pemerintahnya dapat membangun fasilitas pendidikan yang baik, menyediakan guru yang cakap, dan menyediakan dana untuk berbagai program sekolah; orang tua peserta didik masih berkehendak untuk menyumbang dana atau berbagai peralatan yang diperlukan sekolah. Mereka ingin agar anak-anak mereka memasuki dunia nyata dengan bekal pendidikan terbaik yang dapat mereka peroleh. Mereka ingin anak-anak mereka memiliki keunggulan ketika memasuki dunia kerja.

d. Kelompok Masyarakat

Kelompok-kelompok masyarakat seringkali termasuk sebagai sumber penting pendanaan sekolah. Kelompok-kelompok ini dimobilisasi untuk melaksanakan tugas dari para tokohnya (utamanya informal) di masyarakat, seperti kaum ulama. Di Indonesia, banyak sekolah (swasta) yang dibangun dan diselenggarakan oleh kelompok-kelompok masyarakat.

e. Peserta didik

Para peserta didik kemungkinan merupakan sumber penggalangan dana sekolah yang baik, jika mereka tahu manfaatnya bagi diri mereka

¹⁶ Efendi Sianturi, dkk, *Bunga Rampai Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Taman-Sidoarjo, Zifatama Jawara, 2020)

sendiri dan bagi sekolah. Berikut adalah cara-cara melibatkan peserta didik yang dapat dipertimbangkan :

1. Pengumpulan dana melalui kegiatan seperti pertanian, memelihara ayam petelur, membuat kerajinan tangan, dan lain-lain.
2. Kegiatan pengumpulan dana: misalnya melalui konser musik, tari, olahraga, pameran, bazar, atau turnamen.

f. Yayasan

Ada sekolah yang didirikan oleh lembaga keagamaan dan lembaga lain yang bukan berdasarkan ideologi tertentu yang merupakan organisasi non pemerintah. Masing-masing memiliki tujuan spesifik dalam mendirikan untuk mengoperasikan sekolahnya juga bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang cerdas dan beradab. Yayasan ini memberikan dukungan finansial kepada sekolah dalam berbagai bentuk, seperti bangunan, peralatan, dan sumber daya manusia. Kemungkinan yayasan ini menyimpan ini dana di bank, yang kemudian diinvestasikan dalam bentuk saham, dan lain-lain. Hasil yang diperoleh digunakan untuk menyediakan dana pengoperasian sekolah.¹⁷

Pada prinsipnya sumber pembiayaan pendidikan bisa diperoleh dari berbagai sumber selama sumber itu diperoleh secara halal dan dipertanggungjawabkan. Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik berupa pembelian alat-alat belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah , orang

¹⁷ Efendi Sianturi, dkk, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Zifatama Jawara, 2020) hlm. 12

tua maupun peserta didik itu sendiri. Sedangkan biaya langsung adalah berupa keuntungan yang hilang yang dikorbankan peserta didik selama belajar.

Alokasi dana ini secara garis besar dapat dibedakan menjadi pengeluaran operasional atau pendapatan dan pengeluaran modal. Pengeluaran operasional merupakan semua pengeluaran yang dilakukan untuk kegiatan yang mendukung proses kegiatan mengajar seperti gaji kepala sekolah, gaji guru tetap maupun gaji guru tidak tetap, penyusunan aktiva tetap, biaya listrik dan telpon. Sedangkan pengeluaran modal merupakan semua pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai barang modal seperti membeli tanah, membangun gedung dan membeli peralatan sekolah.

e. Standar Pembiayaan Pendidikan

Standar pembiayaan adalah sumber yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.¹⁸ Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya operasional, dan biaya personal.

1) Biaya operasional

Biaya operasional dalam standar pembiayaan pendidikan terdiri dari :

- a) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
- b) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai.
- c) Biaya operasional pendidikan tak langsung berupa, daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan sebagainya.¹⁹

¹⁸ PP No. 19 Tahun 2005.

¹⁹ Fatah Nanang, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012)

2) Biaya personal

Biaya personal merupakan biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan, antara lain meliputi pakaian, transpor, buku, konsumsi, dan akomodasi.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. PP ini diperkuat dengan PP No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, di mana biaya pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik.

Biaya satuan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, dan peserta didik. Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan terdiri dari biaya investasi dan operasional. PP No. 48 tahun 2008 ini sifatnya melengkapi dan mengukuhkan PP No. 19 tahun 2005, tidak ada pemberlakuan standar ganda pada penggunaan kedua PP tersebut, karena PP No. 48 tahun 2008 memberikan penafsiran yang lebih jelas terhadap PP No. 19 tahun 2005 tentang pendanaan pendidikan.

f. Sistem Pembiayaan Pendidikan di Sekolah/Madrasah

1) Konsep pembiayaan pendidikan di sekolah/madrasah

Biaya pendidikan adalah nilai rupiah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan yang terdiri dari seluruh sumber daya.²⁰ Biaya dalam

²⁰ Fatah Nanang, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012) hlm. 96.

pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dari kegiatan belajar peserta didik yang berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan pemerintah, orang tua, maupun peserta didik sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang dikorbankan peserta didik selama belajar.

Pembiayaan pendidikan merupakan aktivitas yang berkenaan dengan pendekatan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dana sumber tersebut digunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan. Sistem pembiayaan pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan sumber dana tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah/madrasah. Pendapatan atau sumber dana pendidikan diperoleh dari APBN, APBD, dan masyarakat atau orang tua.

Menurut Levin dan Akdon, pembiayaan sekolah adalah proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.²¹ Jadi pembiayaan pendidikan adalah aktivitas mengelola pendanaan pendidikan yang berwujud uang dan barang untuk membiayai program kegiatan pendidikan yang telah ditetapkan.

Setiap kebijakan dalam pembiayaan sekolah/madrasah akan memengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan dan digunakan sebesar besarnya untuk mencerdaskan peserta didik dan peningkatan mutu. Pembiayaan pendidikan merupakan hal penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, dan pemerintah memiliki peran yang besar di dalamnya. Agar penggunaan efektif setiap lembaga pendidikan, madrasah/sekolah seharusnya menetapkan rencana yang

²¹Akdon, et.al, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan* (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2015),

menjadi prioritas pembiayaan pendidikan secara komprehensif dari program pembiayaan yang melibatkan keputusan yang kritis dalam wilayah program pendidikan yang harus dibiayai, sistem pajak yang digunakan untuk pembiayaan program, dan sistem alokasi dana negara untuk wilayah atau daerah persekolahan.

Fungsi pembiayaan adalah untuk mendukung agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan landasan dan misi yang diemban bangsa. Konsep pembiayaan identik dengan anggaran. Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif pada bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan lembaga pada kurun waktu tertentu.

Anggaran pembiayaan pendidikan disusun untuk menggambarkan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh madrasah/lembaga pendidikan. Anggaran dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian pada manajemen pembiayaan pendidikan untuk mengarahkan madrasah/sekolah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Dalam arti yang lebih makro anggaran mempunyai fungsi :

- a) Sebagai alat penafsir, yaitu untuk memerkirakan besarnya pendapatan dan pengeluaran sehingga dapat dilihat kebutuhan data yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan sehingga di madrasah/sekolah.
- b) Sebagai alat kewenangan yaitu dapat memberikan kewenangan untuk pengeluaran dana sehingga melalui anggaran tersebut dapat diketahui besarnya dana yang boleh dikeluarkan untuk membiayai kegiatan berdasarkan perencanaan anggaran sebelumnya.
- c) Sebagai alat efisiensi yaitu dapat diketahuinya, realisasinya sebuah kegiatan yang kemudian dapat dibandingkan dengan perencanaan, sehingga dapat dianalisis ada tidaknya pemborosan atau penghematan

anggaran.²² Menurut John, Morphet, dan Alexanders, dalam Akdon, ada beberapa kebijakan umum yang biasa dianjurkan oleh ahli pembiayaan pendidikan antara lain :

- 1) Jika masukan biaya tambahan akan menambah lebih banyak keuntungan secara individu dan sosial sistem pendidikan dibandingkan dengan jurnal investasi, maka masukan pembiayaan harus ditingkatkan.
- 2) Jika keuntungan secara individual dan sosial dari sistem organisasi dapat menghasilkan dengan masukan biaya yang lebih kecil, maka masukan pembiayaan seharusnya dikurangi.
- 3) Jika unit administrasi sekolah merupakan unit yang sangat kecil dapat mencapai keuntungan dalam skala ekonomi penting untuk memaksimalkan keuntungan pendidikan, per rupiah masukannya, maka sistem sekolah/madrasah itu harus ditinjau organisasinya secara tepat.
- 4) Jika struktur organisasi tidak berfungsi secara efisien dan efektif untuk memaksimalkan keuntungan pendidikan, maka struktur organisasi itu harus di modifikasi.
- 5) Jika setiap kebijakan pendidikan, program atau cara kerja tidak berfungsi, tidak efektif/efisien, maka kebijakan pendidikan harus di ubah.²³

Pendidikan dalam operasionalnya tidak terlepas dari pembiayaan atau moneter. Biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan tidak akan tampak hasilnya secara nyata dalam waktu yang relatif singkat, oleh karena itu uang yang dikeluarkan pemerintah,

²²Luneto, Buhari, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah*, Tadbir, Vol 3, No.2 (2015)23

²³Akdon, et.al, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, (2015), 25-26

masyarakat, maupun orang tua, untuk menghasilkan pendidikan atau membeli pendidikan bagi anaknya dipandang sebagai investasi, yang di masa mendatang akan menghasilkan keuntungan atau manfaat dalam bentuk finansial dan nonfinansial.²⁴

Dukungan finansial yang cukup akan mempermudah proses manajerial suatu lembaga pendidikan suatu lembaga pendidikan untuk berbuat banyak dalam upaya memajukan lembaga pendidikan yang dipimpin. Keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan

2. Mutu Pendidikan

a. Pengertian Mutu Pendidikan

Dalam pembahasan mengenai mutu pendidikan ini, jika ditinjau dari segi definisi memang cukup bervariasi. Akan tetapi sebelum menjelaskan secara terperinci berdasarkan para pengamat, dan ahli pendidikan, disini penulis terlebih dahulu mendefinisikan mutu secara terpisah, karena kata “mutu” dan “pendidikan” keduanya mempunyai makna tersendiri.

Adapun menurut Usman dalam bukunya “*Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*” bahwa makna mutu mempunyai implikasi yang beragam bergantung pada siapa menggunakannya. Mutu berasal dari bahasa latin yaitu “*Qualis*” yang memiliki arti *whatkindof* (tergantung kata apa yang mengikutinya). Menurut Deming mutu ialah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Sedangkan Juran menyatakan bahwa mutu adalah “*qualityisfitnessforuse*” yang berarti produk yang layak untuk digunakan.

Arcoro mengatakan bahwa mutu merupakan sebuah aktivitas teratur untuk merevisi suatu keluaran yang di produksi. Mutu berdasarkan pada

²⁴ Fattah, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan* Bandung, PT Remaja Rosdakarya, (2013), 6-7

akal sehat. Mutu merupakan integritas ciri-ciri atau karakteristik dari sebuah produk. Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa mutu tidak dapat diartikan sendiri tanpa adanya konteks atau hal tertentu.

Mutu berarti sesuatu yang dinamis mengikuti dinamika konsumen dan lingkungan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Goestch dan Davis “*Quality is a dynamic state associated with products, services, people, processes, and environments that meets or exceeds expectations*”. Mutu adalah keadaan aktif dimana hal ini berkaitan dengan hasil luaran, partisipasi dari manusia, mekanisme, dan lingkungan yang mendukung.

Menurut Daryanto & Farid mutu merupakan proses pendidikan yang aktif, kreatif, inovatif dan suasana belajar yang menyenangkan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Outputnya dideklarasikan kualitas jika hasil belajar dicapai oleh siswa baik dibidang akademik maupun non-akademik tinggi.²⁵

Mutu atau kualitas bermula dari bahasa inggris quality dalam bahasa Indonesia di sebut kualitas. *Quality* memiliki berbagai pengertian seperti (1) suatu karakter yang khusus dan berbeda dari yang lain, (2) suatu barometer karakter kebaikan tertinggi, (3) mempunyai keadaan yang baik. Sedangkan menurut KBBI, mutu memiliki arti takaran antara baik atau buruknya suatu benda²⁶.

Mutu dapat dikatakan sebagai penerapan dari ajaran Ihsan, yang berarti melakukan perbuatan baik pada seluruh makhluk hidup dengan alasan karena Allah SWT telah memberikan nikmatnya dengan berlimpah sehingga kita dapat memanfaatkan hal tersebut dengan sebaik-baiknya.

Serta kita makhluk bumi dilarang untuk membuat kerusakan apapun bentuknya. Hal ini didasari oleh Al-Qur’an Surat Al Qashas ayat 77:

²⁵ Enny Diah Astuti et al., “The Analysis of Relationship Between Quality of Graduates and Education Financing Management in Private Islamic School”, *Journal on Education*, 2023.

²⁶ Suwarni, 201115, “*Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Universitas Dehasen Bengkulu*”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol 3, No. 1, hlm. 86

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.²⁷

Ayat selanjutnya yang menjelaskan mengenai mutu ialah Al-Qur’an Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.²⁸

Dimana ayat tersebut menjelaskan bahwasanya seorang seharusnya melaksanakan pekerjaan dengan memegang komitmen pada proses serta hasil yang berkualitas dan memuaskan. Selain itu seseorang seharusnya melakukan pekerjaan secara maksimal secara efektif dan efisien.

Kemudian pada Al-Qur’an pada Surat An-Naml ayat 88 yang berbunyi:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي لَآ أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ
بِمَا تَفْعَلُونَ

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah, Q.S Al-Qashas 28:77

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah, Q.S An-Nahl 16:90

Terjemahnya:

“Dan engkau akan melihat gunung-gunung, yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan (seperti) awan berjalan, (itulah) ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia Mahateliti apa yang kamu kerjakan”.²⁹

Juga memiliki penjelasan mengenai mutu yaitu bahwasanya seseorang wajib melaksanakan segalanya dengan serius serta teliti dan janganlah mengerjakan sesuatu dengan main-main sehingga hasil yang didapatkan memuaskan.

Mutu memiliki macam-macam kriteria, dan kriteria tersebut berubah secara kontinu. Setiap orang akan mempunyai kriteria dan pilihan yang berbeda pula, dari beberapa pengertian mutu diatas dapat disimpulkan bahwa mutu merupakan ukuran kualitas, jadi segala sesuatu dapat dikatakan bermutu apabila telah mencapai standar yang telah ditetapkan dan berdampak pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya makna dari pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kegiatan perubahan perilaku dan karakter seseorang atau sekelompok orang dalam proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam upaya mendewasakan seseorang melalui usaha pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.³⁰

Menurut Oemar Hamalik, pendidikan bermakna suatu aktivitas sosial sebab pendidikan berkewajiban untuk membentuk seseorang (anak didik) untuk hidup bermasyarakat dimanapun ia berada melalui proses sosialisasi.³¹ Hal ini berarti bahwa pendidikan adalah komponen yang sangat penting dan berpengaruh pada kehidupan manusia, dikarenakan dengan pendidikan individu tersebut akan diatur dan diasah sehingga terbiasa. Pendidikan yang didapat tidak hanya melalui pendidikan formal namun juga pendidikan non formal. Dengan demikian, pendidikan juga berfungsi pula bagi individu untuk menentukan jati dirinya sendiri setelah menemukan hakikat kedewasaannya.

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah, Q.S An-Naml 27:88

³⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia, offline, diakses pada tanggal 20-12-2022

³¹ Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 73

Mutu pendidikan merupakan pertanggung jawaban dari proses pendidikan dimana dalam mencapai kepuasan pelanggan dengan cara meningkatkan kepentingan dan mengembangkan bakat serta minat pelanggan. Pelanggan dalam konteks yang dimaksud yaitu peserta didik. Disisi lain juga harus mencapai standar yang telah ditargetkan oleh stakeholder yaitu yang membiayai dalam produksi maupun produk dari proses pendidikan. Hal ini seperti pernyataan Hoy, Jardine and Wood yang berbunyi *“quality in education is an evaluation of the procces of education which enhances the need to achieve and develop the talents of the process, and at the time meets the accountability standards set by the clients who pay for the process the outputs from the process of educating”*.

Pada fokus pendidikan, mutu berkaitan erat dengan agenda yang dijalankan dan produk pendidikan dimana hal ini dapat mencapai target atau harapan sesuai tingkat dan standart pada masyarakat dalam dunia pekerjaan. Mutu pendidikan memiliki dua kata yang bermula dari mutu dan pendidikan, yang memiliki arti merujuk pada kualitas produk yang dihasilkan lembaga pendidikan atau madrasah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peserta yang mempunyai prestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik.

Pendidikan dikatakan bermutu jika pendidikan tersebut mampu memenuhi standar serta mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, sedangkan sekolah dan guru harus memiliki harapan yang tinggi terhadap siswa. Guru berusaha layanan pembelajarannya yang memberikan kepuasan kepada para peserta didiknya. Kepala sekolah memberikan kepuasan kepada para tenaga pendidik dan kependidikan lainnya, dan dalam kinerja kelembagaan secara keseluruhan memberikan kepuasan kepada masyarakat dan dunia kerja.

Mutu lembaga pendidikan yaitu keseluruhan kondisi dan karakteristik masukan, proses serta hasil atau layanan institusi perguruan tinggi yang

dihitung dari sebanyak standar yang telah ditentukan sebagai tolak³²ukur penilaian untuk menetapkan dan merefleksikan mutu lembaga pendidikan. Penilaian mutu dalam rangka akreditasi lembaga pendidikan harus didasari oleh kualifikasi yang utuh dan jelas sebagai tolak ukur penilaian tersebut, dan juga membutuhkan representatif operasional mengenai prosedur dan tahap-tahap yang dilalui, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis.³³

Pendidikan yang bermutu dilihat dari segi masukan (input), proses, dan luaran (output/outcome).³⁴Input dari pendidikan yang berkualitas berawal dari tenaga pendidik yang berkualitas, peserta didik yang berkualitas, kurikulum yang sesuai, sarana dan prasarana yang mendukung, dan beberapa bidang penyelenggara pendidikan yang berkualitas. Proses pendidikan yang berkualitas merupakan proses dari pembelajaran yang berkualitas. Sedangkan output yang berkualitas merupakan lulusan yang mempunyai kemampuan sesuai standar dan outcome pendidikan yang berkualitas merupakan lulusan yang meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau lulusan yang diterima kerja yang unggul.

Mutu pendidikan yang diharapkan tidak akan datang secara instan melainkan harus dipikirkan secara matang dari perencanaan selama proses perubahannya, hal ini sesuai dengan pernyataan Sallis yang dikutip oleh Rohiat, yaitu: *“Quality doesn’t just happen. It must be planned for quality need to be approached systematically using a rigorous strategic planning process.*

³³ Suwarni, 2015, “Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Universitas Dehasen Bengkulu”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol 3, No. 1, hlm. 86

³⁴Mulyasa, E, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 180

Strategic planning is one of the mayor plants to TQM, without clear long-term direction the instution can't plan for quality improve".³⁵

Artinya kualitas dalam dunia pendidikan tidak terjadi secara instan begitu saja, kualitas yang diharapkan tersebut harus direncanakan terlebih dahulu dengan sistematis. Mutu merupakan hal yang krusial dan penting dalam strategi pada sebuah lembaga dan dalam menggapainya harus menggunakan pendekatan yang sistematis dan menerapkan proses perencanaan yang matang. Perencanaan strategi yaitu salah satu unit dalam upaya peningkatan mutu. Oleh sebab itu, dalam konteks manajemen peningkatan mutu pendidikan, suatu hal dikatakan berkualitas jika dapat menyampaikan kemaslahatan, baik kepada dirinya sendiri (lembaga pendidikan itu sendiri), kepada orang lain (stakeholder dan pelanggan). Inti dari memberikan kemaslahatan tersebut yakni mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan.

Mutu pendidikan mengarah pada masukan, proses, luaran serta dampaknya:

- a. Mutu masukan bisa terlihat dari sejumlah sisi yaitu keadaan baik maupun buruknya masukan sumber daya manusia seperti kepala sekolah, pendidik, staf dan peserta didik, terpenuhi atau tidaknya barometer masukan material seperti kurikulum dan sarana prasarana, memenuhi atau tidaknya perangkat lunak seperti peraturan dan struktur organisasi, mutu masukan yang bersifat harapan seperti visi misi dan cita-cita.
- b. Mutu proses menyangkut artian bahwa efisiensi sumber daya lembaga pendidikan mengubah beberapa jenis masukan dan keadaan untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu dari peserta didik.
- c. Hasil atau luaran pendidikan dilihat bermutu jika lembaga pendidikan dapat memformulasikan keunggulan akademis dan non akademis pada

³⁵Rohiat, *Manajemen Sekolah: Teori dan Praktek*, (Bandung, Refika Aditama, 2009), hlm. 52.

peserta didik yang dinyatakan mencapai goal untuk satu tingkat pendidikan ataupun melaksanakan agenda pembelajaran tertentu.³⁶

b. Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan

Pendidikan yang bermutu adalah cita-cita juga kewajiban segenap pemegang kendali (stakeholder) pendidikan. Pada umumnya setiap orang pastinya akan memilih untuk menuntut ilmu di lembaga pendidikan yang berkualitas baik. Dengan berpedoman pada hal ini, maka sekolah/ lembaga pendidikan wajib mampu memberikan layanan serta kualitas yang tinggi sehingga tidak dicampakkan dan sanggup untuk berkompetisi dengan lembaga pendidikan lainnya.

Dilihat dari segi kehidupan budaya masyarakat, pendidikan berfungsi sebagai salah satu instrumen dalam pemberadaban masyarakat pada manusia itu sendiri. Juga sebagai instrumen pendidikan yang dimanfaatkan untuk memusatkan pertumbuhan serta perkembangan hidup umat manusia. Sebagai manusia individu dan sebagai manusia bersosial yang memfokuskan titik optimum potensi untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia juga diakhirat. Oleh sebab itu, pendidikan harus benar-benar berkualitas karena mengemban tanggung jawab yang besar untuk kemajuan umat manusia.

Untuk bisa menghadapi tantangan dan dapat menanggapi kemungkinan yang akan terjadi dibutuhkan pembaharuan sistem yang fundamental dalam suatu lembaga pendidikan. Bermula dari perencanaan yang terstruktur dan mencakup guna membiasakan tujuan lembaga pendidikan dengan kepentingan masyarakat. Tidak hanya itu juga dibutuhkan kombinasi dan ketegasan antara

³⁶SudarwanDanim, *Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi Ke Lembaga Akademik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hlm. 53

cita-cita dengan implementasi, pemberdayaan, reorientasi sistem, inovasi dalam manajemen dan pengembangan sumber daya manusia.³⁷

Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyulut rendahnya mutu pendidikan di Indonesia:

- a. Kebijakan dalam pengelolaan pendidikan sedikit banyaknya masih menerapkan pendekatan *educational production function* atau input analisis dengan tidak konstan.
- b. Pengelolaan pendidikan dilaksanakan menurut sentralistik atau terpusat
- c. Kedudukan masyarakat pada pengelolaan pendidikan khususnya wali peserta didik terbilang cukup rendah.

Berdasarkan beberapa penyebab diatas maka prosedur taktis yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan yaitu melalui transformasi seperti:

- a. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (*school based management*) dimana lembaga pendidikan/ sekolah diberikan wewenang untuk mengelola secara pribadi usaha meningkatkan mutu secara komprehensif.
- b. Pendidikan yang berlandaskan peranan komunitas (*community based education*) dimana berlangsung hubungan yang kontributif diantara masyarakat dan sekolah, serta sekolah sebagai *community learning center*
- c. Mengaplikasikan representasi belajar (*learning paradigm*) yang akan membentuk peserta didik (*learner*) menjadi manusia yang berkemampuan.³⁸

³⁷Abdurrahman Mas'ud, et.al., *Paradigma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm. 110-120.

Mengenai hal-hal yang diterapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan diantaranya :

- a. Peningkatan profesionalisme tenaga pendidik
- b. Peningkatan isi materi
- c. Peningkatan pengaplikasian metode
- d. Peningkatan sarana dan prasarana
- e. Menimbulkan motivasi belajar

Selain itu Crosby, salah satu tokoh mutu yang populer dan dikenal dengan pendekatannya yang sangat praktis serta dapat diterapkan sebagai rencana kegiatan memiliki 14 langkah atau program untuk meraih mutu. Program peningkatan mutu Philip Crosby adalah salah satu bimbingan atau arahan yang paling detail dan praktis. Adapun 14 langkah atau program peningkatan mutu Crosby adalah sebagai berikut:³⁹

- a. Komitmen Manajemen (*ManagementComitment*). Merupakan hal krusial menuju sukses dan merupakan poin yang disetujui oleh semua para pakar dalam hal mutu. Inisiatif mutu harus diarahkan dan dipimpin oleh manajemen senior dan adanya komitmen tersebut harus dikomunikasikan dalam sebuah statemen kebijakan mutu yang singkat, jelas dan dapat dicapai.
- b. Membangun Tim Peningkatan Mutu (*QualityImprovement Team*) diatas dasar komitmen. Tim peningkatan mutu bertugas mengatur dan mengarahkan program yang akan diimplementasikan melalui organisasi. Tim ini tidak melakukan seluruh kerja mutu, implementasi seluruh kerja mutu merupakan tanggung jawab tim dalam setiap departemen. Rencana

³⁸Maswan, Desember 2015, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah*, Jurnal Tarbawi Vol. 12. No. 2 Hlm. 197

³⁹ Edward Sallis, *Total QualityManagement In Education*Cet II, (Jogjakarta: IRCISOD, 2010), Hlm. 110-118

yang dirancang tim peningkatan mutu harus diterima dan didukung oleh manajemen senior.

- c. Pengukuran Mutu (*Quality Measurement*). Berfungsi untuk menghitung ketidaksesuaian yang saat ini atau yang akan muncul dengan cara evaluasi dan perbaikan. Bentuk-bentuk pengukuran mutu berbeda antara organisasi produksi dan organisasi layanan. Bentuk pengukuran bergantung pada data inspeksi, laporan pemeriksaan, data statistik dan data umpan balik dari pelanggan.
- d. Mengukur Biaya Mutu (*The Cost of Quality*). Mengidentifikasi biaya mutu dan memberikan perhatian lebih terhadapnya adalah hal yang penting untuk dilakukan. Biaya mutu terdiri dari biaya kesalahan, biaya kerja ulang, biaya pembongkaran, biaya inspeksi dan biaya pemeriksaan.
- e. Membangun Kesadaran Mutu (*Quality Awareness*). Kesadaran yang ditumbuhkan yaitu kesadaran akan biaya mutu (*The Cost of Quality*) dan kesadaran akan keharusan untuk mengimplementasikan program yang dirancang oleh Tim Peningkatan Mutu (*Quality Improvement Team*). Membangun kesadaran akan mutu dapat dilakukan dengan metode komunikasi seperti rapat dan pertemuan yang teratur antara pihak manajemen dan karyawan untuk menginformasikan terkait program peningkatan mutu.
- f. Kegiatan Perbaikan (*Corrective Actions*). Kegiatan ini guna memperbaiki mutu yang rendah. Kegiatan perbaikan melibatkan kerjasama para pengawas dan seluruh staf dengan metodologi yang sistematis untuk mengatasi masalah yaitu dengan adanya tim tugas dan laporan.
- g. Perencanaan Tanpa Cacat (*Zero Defect Planning*). Merupakan kegiatan tanpa cacat yang harus dikenalkan dan dikoordinasi oleh tim

peningkatan mutu dimana juga bertanggungjawab dalam implementasinya.

- h. Pelatihan Pengawas (*Supervisor Training*). Pelatihan ini hal krusial bagi manajer agar mereka memahami peranan mereka dalam peningkatan mutu, dan penting bagi staf yang melaksanakan peranan manajemen tengah. Pelatihan ini dapat dilakukan dengan program pelatihan formal.
- i. Hari Tanpa Cacat (*Zero Defect Day*). Ini adalah kegiatan sehari penuh yang memperkenalkan ide tanpa cacat guna menyoroti dan merayakan penerapan metode tanpa cacat serta untuk menekankan komitmen manajemen terhadap metode tersebut.
- j. Penyusunan Tujuan (*Goalsetting*). Tujuan yang hendak dituju oleh tim harus spesifik dan terukur.
- k. Penghapusan Sebab Kesalahan (*Error Cause Removal*). Hal ini dapat diraih dengan mendesain sebuah bentuk standar yang sesuai dengan garis manajemen. Hal ini juga berguna agar para staf dapat mengkomunikasikan kepada manajemen tentang situasi-situasi tertentu yang mempersulit implementasi metode tanpa cacat.
- l. Pengakuan (*Recognition*). Pengakuan disini merupakan penghargaan terhadap prestasi dan kontribusi para staf dalam program peningkatan mutu. Crosby berpendapat bahwa penghargaan tersebut harus dihubungkan dengan rancangan tujuan, yang mana penghargaan tersebut berupa pengakuan, hadiah atau sertifikat bukan uang.
- m. Mendirikan Dewan-Dewan Mutu (*Quality Councils*). Yaitu struktur institusional yang berisi beberapa tenaga ahli yang berfungsi untuk menetapkan tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan tepat dan baik. Bagian dari peran dewan mutu adalah mengawasi efektifitas program dan menjamin bahwa proses peningkatan tersebut terus berlanjut.

- n. Lakukan Lagi (*Do it Over Again*). Agenda mutu merupakan aktivitas yang tidak pernah berakhir. Ketika tujuan agenda telah tercapai, maka agenda tersebut harus dimulai lagi.

3. Manajemen Pembiayaan dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan

Sistem *qualityassurance* salah satu dari berbagai upaya untuk menyelenggarakan pendidikan dimana mengaplikasikan prinsip pemakaian sumber daya secara efisien. Nampak bahwasanya prinsip *valueformoney* bisa diduga sebagai faktor eksternal bagi pendidikan dalam usahanya mendorong pengaplikasian strategi untuk menjamin mutu pendidikan.

Dengan terdapatnya *systemqualityassurance* hal ini membuat masyarakat memiliki hak guna memperoleh informasi mengenai bagaimana lembaga pendidikan mempertahankan dan mengontrol mutu melalui kesibukannya serta sampai dimana instansi pendidikan bisa melayani kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah.

Keadaan-keadaan dimana diterapkannya sistem tersebut termasuk faktor pendorong pada pentingnya mekanisme untuk *qualityassurance*. Keberadaan mekanisme tersebut dianggap memberikan akomodasi dalam pelaksanaan evaluasi diri pada setiap instansi pendidikan secara efektif. Oleh sebab itu, dalam manajemen mutu fokus tidak hanya sampai perbaikan mutu, namun juga mengupayakan terjadinya mekanisme yang tepat baik dari dalam ataupun dari luar instansi pendidikan guna memberikan jaminan tercapainya mutu yang unggul.

Keberadaan mutu suatu lembaga pendidikan adalah paduan sifat-sifat layanan yang diberikan yang menyamai atau melebihi harapan serta kepuasan pelanggannya, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Jika tujuan mutu adalah

memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelanggan, maka hal yang harus diperjelas adalah kebutuhan dan keinginan pelanggan.

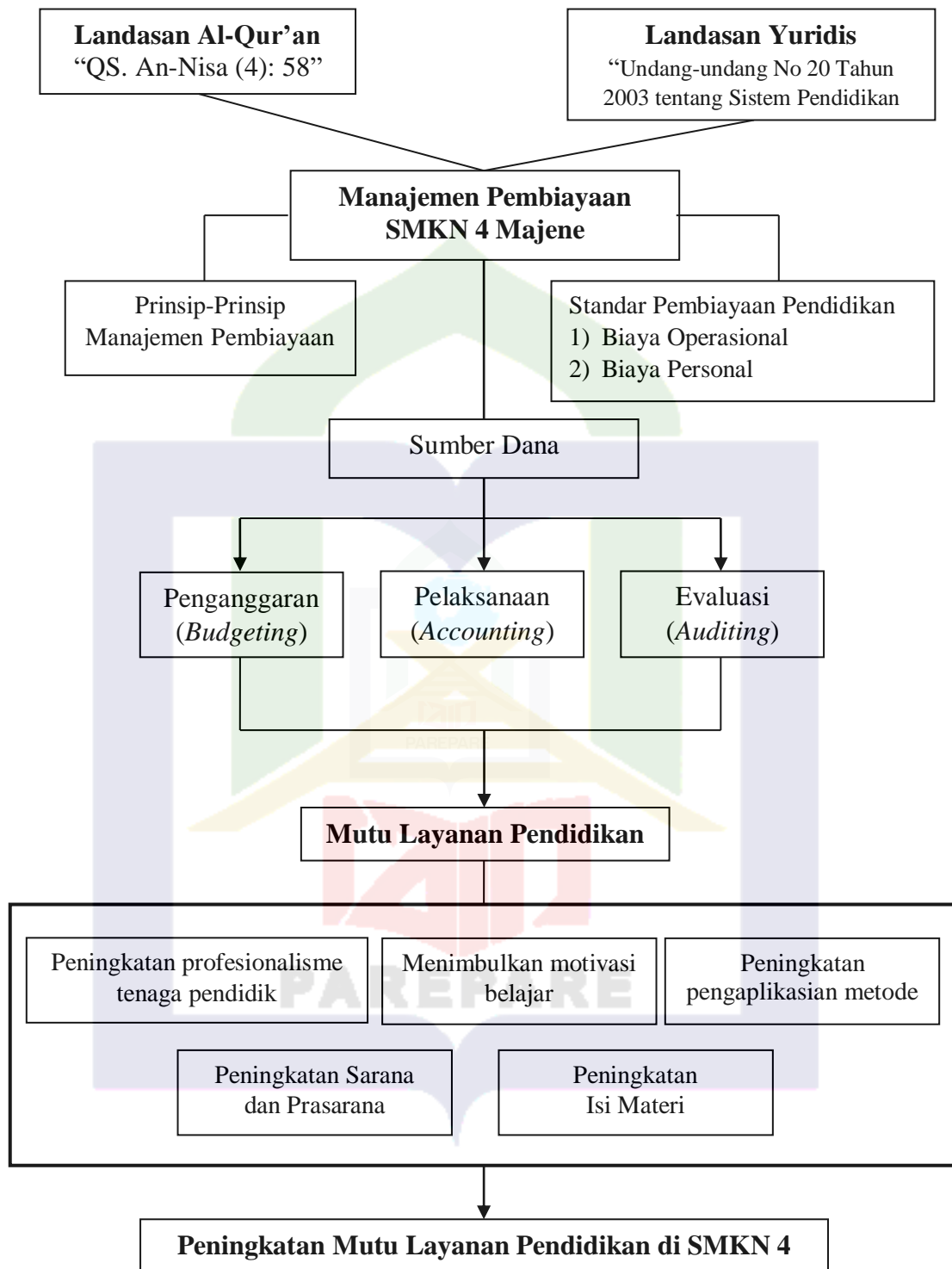
Untuk mengupayakan agar layanan yang diberikan itu memberikan kepuasan kepada pelanggannya maka berbagai jenis pelayanan dan pelanggannya masing-masing harus dipilah-pilah. Sebagaimana dijelaskan pelanggan lembaga pendidikan dikategorikan dalam dua macam yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Ini berarti lembaga harus memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang ada di dalam sistem penyelenggaraan pendidikan itu (pelanggan internal), yaitu guru dan karyawan; dan pihak-pihak yang bukan menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan pendidikan (pelanggan eksternal), yaitu siswa, orang tua, pemerintah, penyandang dana, pemakai lulusan. Jadi, lembaga pendidikan bermutu adalah lembaga yang mampu memberikan layanan yang sesuai atau melebihi harapan guru, karyawan, peserta didik, penyandang dana (orang tua, pemerintah), dan pemakai lulusan.⁴⁰

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir adalah kerangka model yang koheren untuk berhubungan antara konsep dan variabel yang memberikan gambaran lengkap tentang fokus penelitian. Kerangka berpikir biasanya dinyatakan dalam bentuk bagan/grafik atau grafik.

Dalam penelitian ini membahas mengenai manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMKN 4 Majene. Adapun bagan kerangka pikir yang digunakan adalah sebagai berikut :

⁴⁰Thorik Guna dan Utus Hardiono Sudibyo, *Marketing Muhammad*. (Bandung: Madani Prima 2007), 78



Gambar 3.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir di atas dijelaskan bahwa melaksanakan manajemen pembiayaan tentunya ada landasan baik landasan Al-Qur'an maupun landasan yuridis sebagai tolak ukur kualitas suatu kebijakan manajemen pembiayaan agar sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Manajemen pembiayaan yaitu pengelolaan terhadap sumber dana pendidikan mulai dari penganggaran (*Budgeting*), pelaksanaan (*Accounting*) hingga evaluasi (*Auditing*). Pelaksanaan manajemen pembiayaan tidak lepas dari perhatian terhadap prinsip-prinsip manajemen pembiayaan dan standar pembiayaan pendidikan yang meliputi biaya operasional dan biaya personal. Target dari manajemen pembiayaan pendidikan ini adalah memenuhi dan meningkatkan mutu layanan pendidikan. Upaya yang perlu dipenuhi dalam mutu layanan pendidikan adalah peningkatan profesionalisme tenaga pendidik, menimbulkan motivasi belajar, peningkatan pengaplikasian metode, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan isi materi sehingga dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus (*Case Study*) dengan metode kualitatif. Menurut Winston M. Tellis, studi kasus merupakan salah satu cara penelitian yang mempunyai unit analisis yang mengacuh pada tindakan individu maupun lembaga itu sendiri. Studi kasus berfokus pada tindakan atau perilaku yang dihasilkan sehingga menghindari ketidakjelasan pada individu atau lembaga tertentu.

Pendekatan kualitatif ini dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, disarankan dan dilakukan oleh partisipasi atau sumber data. Artinya memperoleh data bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan bagaimana adanya yang terjadi di lapangan, yang dialami, disarankan dan difikirkan oleh partisipan data.⁴¹

Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus ini karena peneliti ingin menganalisis di lapangan dan ingin mengumpulkan data atau informasi mengenai bagaimana proses manajemen pembiayaan pendidikan yang ada di SMKN 4 Majene. Data peneliti yang kumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, catatan dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu peneliti hanya ingin menggambarkan realita empirik, dibalik fenomena secara

⁴¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*” (Makalah dan Skripsi), (Parepare:IAIN Parepare, 2020), h.22

mendalam, lebih rinci, dan tuntas dengan masalah yang akan peneliti teliti nantinya.

b. Jenis penelitian

Dalam penyusunan penelitian “Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di SMKN 4 Majene”. Menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian Kualitatif merupakan sebuah penelitian sebagai instrumen kunci.⁴²

Menurut Bodgan dan Taylor menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Digunakannya metode kualitatif yang dimaksudkan untuk menemukan dan memahami apa yang ada dibalik fenomena yang akan diteliti.⁴³

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian mengambil lokasi di SMKN 4 Majene yang beralamat di Jln. Poros Majene-Mamuju, Kab. Mejene, Kec. TuboSendana, Desa Bonde-bonde. SMKN 4 Majene ini merupakan sekolah formal yang di naungi oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemilihan latar penelitian ini dilandasi dengan adanya karakteristik yang sesuai antara judul penelitian dan kondisi latar yang dipilih.

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih selama dua bulan namanya Mei-Juni 2023.

C. Fokus penelitian

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

⁴² Sugiono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 15

⁴³ Anggraini, “*Kompetensi Pedagogik Guru PAI di SMP Negeri 1 Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir*”, (UIN Raden Fatah Palembang, 2020)

1. Manajemen pembiayaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
2. Mutu layanan pendidikan yang berfokus pada kompetensi lulusan.

Adapun subjek penelitian yang dijadikan informan dalam melakukan penelitian ini adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah di SMKN 4 Majene. Informan dalam penelitian ini juga dibatasi, mengingat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa informan itulah yang dinilai dapat memberikan data yang valid, akurat dan reliabel.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini lebih menggunakan jenis data kualitatif yang merupakan sebuah data yang berbentuk kata-kata atau verbal yang dapat diperoleh melalui sistem wawancara. Menurut Ridwan bahwa data ini adalah data yang paling banyak ditemui pada penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, kalimat-kalimat, narasi-narasi. Penulisan ini didukung oleh data-data yang diperoleh peneliti agar penulisan lebih akurat dan tepat.⁴⁴

2. Sumber Data

Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

⁴⁴ Anggraini, Analisis Kompetensi Pedagogik Guru PAI Di SMP Negeri 1 Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir", (*Uin Raden Fatah Palembang*, 2020)." h, 39

a. Sumber primer

Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan bendahara sekolah. Penelitian ini juga turun langsung kelapangan atau lokasi untuk mengamati dan untuk memperoleh data primer pada penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara, serta observasi lapangan dan kemudian data tersebut dianalisis agar dapat tercapai tujuan dari penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian adalah berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti dokumen profil sekolah.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya menggunakan beberapa teknik dan instrumen yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan agar data yang diperoleh dari lapangan benar-benar valid dan otentik. Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian karena tujuan dari pada penelitian tersebut yaitu mendapatkan sebuah data. Adapun teknik dan instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Merupakan sebagai alat pengumpulan data harus sistematis artinya observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh para peneliti lainnya. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data yang

erat hubungannya dengan penelitian ini. Peneliti akan mengumpulkan data dengan cara mencatat, mendokumentasi secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Sehingga data yang diperoleh dapat bertanggung jawab kevaliditasan dan kreabilitasnya.⁴⁵

Dalam observasi ini peneliti melihat keadaan tertentu mengenai Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan (Studi Kasus di SMKN 4 Majene). Kegiatan observasi yang dilakukan oleh peneliti ini yaitu dengan cara mengamati secara langsung dilapangan dan mencatat apa yang ditemukan dilapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kegiatan observasi peneliti lakukan dengan mengamati bagaimana cara pengelolaan pembiayaan yang ada di SMKN 4 Majene.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan kepada responden yang terkait dengan daftar pertanyaan yang telah disediakan oleh pewawancara yang terkait dengan bagaimana pembiayaan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMKN 4 Majene.

3.) Dokumentasi

Merupakan suatu bahan tertulis atau terfilemkan selain *recird* yang tidak disiapkan khusus atau permintaan peneliti.⁴⁶

Dokumentasi dapat berupa rekaman, gambar, arsip dan lain-lain. Data

⁴⁵Djaelani, Aunu Rofiq, *Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif*, Majalah Ilmiah Pariwisata 20.1 (2013): 82-92

⁴⁶ A. Chaedar Al wasilah, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Pustaka Jaya, 2011) Cet. VI, h.110

tersebut dapat dijadikan sebagai penunjang dan pelengkap data yang dihasilkan dalam penelitian. Metode dokumentasi ini juga merupakan cara yang akurat untuk mengumpulkan data-data yang ada karena dengan adanya metode dokumentasi ini dapat menjadi bukti-bukti yang akurat untuk menyelesaikan masalah yang ada.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi metode atau teknik. Triangulasi metode atau teknik adalah pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber data dan teknik triangulasi teknik. Teknik triangulasi sumber data yaitu membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dengan menggunakan teknik yang sama melalui beberapa sumber yang berbeda.

Teknik triangulasi sumber meliputi kepala sekolah dan bendahara sekolah. Penelitian dilakukan melalui kegiatan wawancara kepada kepala sekolah dan bendahara sekolah, untuk menggali informasi guna mengetahui keselarasan informasi yang diperoleh.

Teknik triangulasi teknik dilakukan dengan melakukan kolaborasi pada pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen melalui sumber yang sama. Peneliti menggunakan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi dan studi dokumen pada saat wawancara dilakukan kepada masing-masing narasumber yaitu kepala sekolah dan bendahara sekolah.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pencandraan (*Description*) serta penyusunan data dan informasi yang telah terkumpul. Tujuannya adalah agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas terkait apa yang ditemukan dan diperoleh di lapangan.⁴⁷

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tehnik analisis data melalui proses data reduction, display, dan conclusion drawing/verification. Ketiga langkah tersebut akan di uraikan sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Pada proses ini peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana cara pengelolaan pembiayaan atau bagaimana manajemen pembiayaan di SMKN 4 Majene.

2. Data Display (Data Display)

Penyajian data dalam penelitian ini berupa uraian singkat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan display data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa angket, wawancara dan dokumentasi bahkan, hasil angket dan wawancraa yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan kepada objek yang di wawancarai berdasarkan pertanyaan yang telah dipersiapkan.

3. Conclusion Drawing/ Verification (kesimpulan)

⁴⁷Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humsniora*(Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 37.

Conclusions Drawing\Verification atau penarik kesimpulan dan verifikasi guna menjawab masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif dari hasil temuan di lapangan. Penarik kesimpulan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana manajemen pembiayaan di SMKN 4 Majene.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil SMKN 4 Majene

SMKN 4 Majene berdiri pada tahun 2004 terletak di Jalan Poros Majene-Mamuju KM 65 Onang, Desa Bonde-Bonde, Kecamatan Tubo Sendana, Provinsi Sulawesi Barat. Memiliki lokasi strategis yang berada di jalan poros provinsi yang menghubungkan setiap kabupaten.

Nama Kepala Sekolah	: Muhammad Nasru, S,Pd. MM
Nama sekolah	: SMK Negeri 4 Majene
N.P.S.N	: 40601490
N.S.S.	: 241.119.901.0022
Provinsi	: Sulawesi Barat
Kabupaten	: Majene
Kecamatan	: Tubo Sendana
Desa/Kelurahan	: Bonde-bonde
Jalan dan Nomor	: Poros Majene-Mamuju Km. 65
Kode Pos	: 91452
Telepon	: 081343793678
Faksimile	:
Status Sekolah	: Negeri
Akreditasi	: B

2. Visi Misi dan Tujuan SMKN 4 Majene

Visi : Mewujudkan SMK yang unggul dan berwawasan lingkungan dengan mengembangkan potensi sumber daya peserta didik menjadi manusia yang memiliki akhlak mulia, cerdas, disiplin, terampil profesional, produktif dan inovatif.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan IPTEK dan IMTAQ kepada peserta didik.
- b. Pengembangan kurikulum melalui pendekatan pendidikan sistem ganda (PSG) dalam menghadapi persaingan global
- c. Peningkatan sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan
- d. Peningkatan mutu pelayanan kepada peserta didik
- e. Mengembangkan kemampuan berwira usaha yang berwawasan lingkungan.

4. Data Tenaga Kependidikan, Pendidik dan Peserta Didik

1) Tenaga Pendidik

Tabel 4.1
Data Tenaga Pendidik PNS tahun 2022/2023

No.	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Nasru, S.Pd. MM	Kepala Sekolah
2	Sanawiah, S.Pd	Guru
3	Nurdin, S.Ag	Guru
4	Yusnah Y, S.Pd	Guru
5	Muawan Pata, S.Pd.i	Guru
6	Basri, S.Pd	Guru
7	Hamriyani, S.Pd	Guru
8	Jamilah, S.Pd	Guru
9	Isnaini, S.Pd	Guru
10	Makmur, S.Pd	Guru
11	Juliastik, S.Pd	Guru
12	Amiruddin, S.Pd	Guru
13	Satriani, S.Pd	Guru
14	Rosmiati, S.Pd	Guru
15	Anita Djauhar, S.Pd	Guru
16	Muhammad Yusuf, S.Pd.i	Guru
17	Lailah, S.Pd	Guru
18	Irmawati, S.Pd	Guru
19	Fathuddin Syahrul, S.Pd	Guru

Tabel 4.2
Data Tenaga Pendidik Non PNS tahun 2022/2023

No.	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Jafar, S.Pd	Guru Tidak Tetap
2	Wahirah, S.Pd	Guru Tidak Tetap
3	Seniwati, S.Pd	Guru Tidak Tetap
4	Rahmi Humaera, S.Pd	Guru Tidak Tetap
5	Nurhidaya.B Malik, S.Pd	Guru Tidak Tetap
6	Syamra Desi Samsul, S.Pd	Guru Tidak Tetap
7	Pajri, S.Pd	Guru Tidak Tetap
8	Darna, S.Pd	Guru Tidak Tetap
9	Muhammad Arif, S.Pd	Guru Tidak Tetap
10	Muhlisah, S.Pd	Guru Tidak Tetap
11	Elvitra, S.Pd	Guru Tidak Tetap
12	Muhammad Tasrif, S.Pd	Guru Tidak Tetap
13	Fajrin Najrin, S.Pd	Guru Tidak Tetap
14	Ferrel Islami, S.Pd	Guru Tidak Tetap
15	Nurazizah, S.S., M.Pd	Guru Tidak Tetap

2) Tenaga Kependidikan

Tabel 4.3
Tenaga Administrasi PNS 2022/2023

No.	Nama	Jabatan
1	Ibrahim, SE	Staf Tata Usaha
2	Hasnawiah. N, S.kom	Staf Tata Usaha
3	Nurdiana	Staf Tata Usaha
4	Fitriadi	Staf Tata Usaha

Tabel 4.4
Tenaga Administrasi Non PNS 2022/2023

No.	Nama	Jabatan
1	Syahrir	Perlengkapan
2	Saparuddin	Kesiswaan
3	Muhaya	Kepegawaian
4	Samrah	Kesektarian
5	Liana	Petugas Perpustakaan
6	Muhammad Fatra Nurdin	Petugas Perpustakaan
7	St Mutiah	Petugas Lab. Tata Busana
8	Jumahir	Penjaga Malam
9	Siska	Petugas Perpustakaan
10	Hasanah, SE	Kesektarian
11	Muh. Afif, S.Pt	Operator Dapodik/Petugas Lab. Komputer
12	Rosmita	Petugas Lab. Teknik Gambar
13	Haslindah	Petugas Lab. Tata Busana
14	Karniwati, S.Pd	Kesiswaan
15	Sri Wahyuni, S.Pd.i	Petugas Perpustakaan
16	Syaripuddin	Satpam

3) Peserta Didik

Tabel 4.5
Data Peserta Didik 2022/2023

A. Kelas X

No.	Program Keahlian	Jumlah Siswa
1	Busana	23
2	Teknik & Bisnis Sepeda Motor	21
3	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	10
4	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	26
Jumlah		80

B. Kelas XI

No.	Program Keahlian	Jumlah Siswa
1	Busana	34
2	Teknik & Bisnis Sepeda Motor	25
3	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	8
4	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	19
Jumlah		86

C. Kelas XII

No.	Program Keahlian	Jumlah Siswa
1	Busana A	21
	Busana B	20
2	Teknik & Bisnis Sepeda Motor	31
3	Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	10
4	Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran	26
Jumlah		108

D. Rekapitulasi

No.	Kelas	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa
1	X	4	80
2	XI	4	86
3	XII	5	108
JUMLAH TOTAL		13	274

B. Hasil Penelitian

1. Perencanaan Pembiayaan (*budgeting*) dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di SMKN 4 Majene

Persepsi mengenai persiapan perencanaan pembiayaan di SMKN 4 Majene di jadikan sebagai acuan untuk melaksanakan program pembiayaan pendidikan dan langkah awal untuk merencanakan anggaran demi tercapainya tujuan yang dirancang di masa sekarang dan yang akan datang di SMKN 4 Majene sudah menjadi agenda yang tidak dapat ditinggalkan.

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah mengatakan bahwa

Ada delapan standar nasional pendidikan itu salah satunya standar pembiayaan. Nah untuk pembiayaan ini memang sangat penting karna semua kegiatan bisa berjalan dengan baik apabila di topang oleh dana yang memadai tetapi bukan berarti, jika tidak ada dana kegiatan sekolah tidak dapat berjalan, tetapi tetap kita upayakan dan usahakan bagaimana agar bisa berjalan. Rencana biaya ini adalah kebutuhan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah kita rumuskan biaya operasionalnya.⁴⁸

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Nasru, Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Majene, tanggal 06 Juni 2023

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi perencanaan pembiayaan di sekolah sangat penting karena mempengaruhi semua program kegiatan yang akan dilaksanakan dan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di sekolah. Adanya sebuah dana yang memadai kegiatan akan berjalan dengan baik, namun sebaliknya apabila tidak ada dana maka kegiatan akan terkendala tetapi sekolah ini selalu berusaha dan berupaya untuk bagaimana agar kegiatan sekolah bisa berjalan.

Senada dengan yang ungkapkan bendahara sekolah dan menambahkan bahwa :

Perencanaan pembiayaan pendidikan itu merupakan suatu proses kegiatan dalam menentukan untuk melakukan suatu kegiatan atau penyusunan pembiayaan di sekolah agar tujuan dan sasaran sekolah dapat dicapai, perencanaan pembiayaan ini merupakan suatu dasar dalam mencapai tujuan sekolah yang semaksimal mungkin.⁴⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembiayaan disini suatu awal atau dasar dalam menentukan untuk melakukan penyusunan pembiayaan untuk mencapai tujuan sekolah secara maksimal.

Perencanaan pembiayaan pendidikan dilakukan dengan mengalokasikan sumber-sumber pembiayaan yang memperhatikan besarnya dana dan kemudian di proyeksikan ke dalam kebutuhan sesuai dengan dengan tujuan yang akan dicapai.

Sebelum menyusun perencanaan pembiayaan pendidikan tentu adanya sebuah metode yang di jadikan sebagai dasar dalam mengoptimalkan sebuah anggaran. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah mengatakan bahwa

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Fitriadi Bendahara SMK Negeri 4 Majene, tanggal 06 Juni 2023

Penyusunan rencana pembiayaan pendidikan di SMKN 4 Majene ini di dahului dengan menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah (RKAS) setiap tahun itu disusun bersama dengan guru tentang apa saja yang perlu di benahi dan yang akan di programkan. Dalam merencanakan pembiayaan itu kita lihat rapor pendidikan sekolah karna sekolah juga memiliki rapor yang warna merah itulah yang harus dan perlu di interpersi kemudian melihat pada fakta yang ada dilapangan yang memang perlu di benahi dan usulan dari guru-guru.

Serupa dengan hal diatas bendahara sekolah juga menambahkan bahwa

Dalam menyusun perencanaan pembiayaan kita punya metode itu salah satunya dengan menyusun apa namanya RKAS untuk dijadikan sebagai acuan kita dalam menggunakan anggaran.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode dalam merencanakan pembiayaan di SMKN 4 Maneje ini yaitu dengan menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS untuk menjalankan sebuah anggaran kedepannya.

Sumber biaya pada RKAS hanya berasal dari negara. Penjabaran tersebut menampilkan perencanaan umum pembiayaan sekolah dari pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sebagaimana hasil wawancara dengan bendahara sekolah.

“SMK 4 Majene ini sebagai sekolah negeri memiliki sumber pembiayaan dari pemerintah yaitu dana BOS dalam setiap tahunnya. Akan tetapi, pada kenyataannya dana ini belum mampu mengcover pembiayaan yang ada disekolah, disamping itu sumber dari masyarakat yang mau menyumbang dan stakeholder lainnya”.

Pada setiap tahunnya sekolah senantiasa melaksanakan yang namanya perencanaan sebagai upaya dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Proses perencanaan ini dilakukan oleh Kepala Sekolah yang dibantu oleh para guru lainnya untuk membangun sekolah yang lebih maju dan

berkembang. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah mengatakan bahwa

Disini kita melaksanakan proses perencanaan dengan berbagai upaya untuk menata sekolah ini. Langkah-langkah tersebut kami laksanakan dengan menganalisa permasalahan yang ada bersama dengan tim sekolah baik itu dari segi manajerial, keuangan, administrasi, layanan dan lain sebagainya, dan juga kita melakukan konsultasi bersama dengan stakeholder lainnya agar diberikan solusi terbaik dalam problematika atau masalah yang ada. Disini kita berupaya melakukan yang terbaik dalam mengelola sekolah ini.⁵⁰

Dari hasil wawancara bersama dengan bendahara sekolah mengatakan bahwa

Proses perencanaannya itu kita pertama-pertama menentukan pedoman anggaran dulu kemudian kita mempersiapkan anggaran yang kita susun lalu kemudian barulah kita mengalokasikan dana itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses perencanaan pembiayaan pendidikan sekolah ini melakukan upaya dengan menganalisa permasalahan yang ada bersama dengan stakeholder dengan harapan memperoleh pencapaian yang maksimal.

2. Pelaksanaan (*accounting*) pembiayaan pendidikan di SMKN 4 Majene dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SMKN 4 Majene ditetapkan melalui perencanaan yang tertuang dalam RKAS yang menjadi acuan pelaksanaan pembiayaan sekolah. Hal ini berdasarkan hasil dari wawancara dengan kepala sekolah mengatakan bahwa

Pelaksanaan itu merupakan suatu kegiatan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rencana anggaran sekolah itu untuk dilaksanakan yang dimana guna memenuhi

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Nasru, Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Majene, tanggal 06 Juni 2023

kebutuhan sekolah dalam rangka manajemen pembiayaan sekolah.⁵¹

Begitu pula dengan bendahara sekolah menambahkan bahwa

Pelaksanaan ialah proses dalam melaksanakan pembiayaan pendidikan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan RAPBS untuk memenuhi kebutuhan yang ada disekolah.⁵²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan disekolah dilaksanakan berdasarkan rencana yang disusun sesuai dengan rencana anggaran pembiayaan dan belanja sekolah atau yang disebut dengan RAPBS untuk memenuhi kebutuhan yang ada disekolah.

Setelah perencanaan pembiayaan pendidikan di SMK Negeri 4 Majene tersusun tahap selanjutnya ialah melaksanakan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Pelaksanaan pembiayaan pendidikan dapat dilaksanakan mulai awal tahun ajaran baru, yaitu dengan membelanjakan anggaran baik barang maupun jasa, seperti pembayaran gaji guru dan belanja barang keperluan pembelajaran. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan terkadang memiliki kendala, seperti hal yang ungkapkan oleh kepala sekolah yang mengatakan bahwa

Pelaksanaan pembiayaan sepanjang tahun itu cair dalam setahun sekali tetapi terkadang kita punya kendala yang direncanakan itu dana yang sudah disiapkan terkadang membengkak karna biasanya dana belum cair kita sudah melaksanakan kegiatan, makanya disekolah ini terkadang ada peminjaman dari pihak lain karna dana BOS itu biasanya tidak tepat cair.⁵³

Seperti yang diungkapkan oleh bendahara sekolah yang mengatakan bahwa

⁵¹ Muhammad Nasru, S.Pd, M.M, *wawancara* kepala sekolah SMKN 4 Majene, pada tanggal 06 Juni 2023

⁵² Fitriadi, *wawancara* bendahara SMKN 4 Majene, pada tanggal 06 Juni 2023

⁵³ Muhammad Nasru, S.Pd. M.M, *wawancara* kepala sekolah SMKN 4 Majene, pada tanggal 06 Juni 2023

Pembiayaan di SMK 4 Majene ini apa namanya cair dalam satu kali setahun dalam kaitannya dengan pelaksanaan memang kita punya kendala misalnya kita sudah melaksanakan kegiatan tapi dananya itu hasil dari pinjaman. Jadi, sekolah kita ini kadang melakukan peminjaman dari luar karna dana BOS belum cair. Nah, disinilah kita berupaya untuk bagaimana kita melaksanakan pembiayaan secara maksimal.⁵⁴

Berdasarkan pada pernyataan diatas dapat disimpulkan pelaksanaan pembiayaan di SMK Negeri 4 Majene ini memiliki sebuah kendala sehingga melakukan peminjaman dari pihak eksternal untuk menutupi kekurangan yang ada agar tujuan pendidikan dapat tercapai dan terlaksana secara maksimal.

Dalam pelaksanaan pembiayaan sekolah terdapat prosedur di dalamnya yang dijadikan sebagai acuan atau landasan dalam melaksanakan suatu kegiatan berupa pembiayaan berdasarkan pada juknis yang telah ditentukan oleh kementerian, berikut seperti yang diungkapkan kepala sekolah, bahwa

Prosedur pelaksanaan pembiayaan pendidikan kalau dana BOS berdasarkan juknis dari kementerian, di juknis ini ada petunjuk teknismya tentang apa-apa yang perlu dibiayai tidak boleh keluar dari itu, dan itu harus di susun di RKAS di elektroniknya di dalam aplikasi. Tapi kalau dana lain misalnya sumbangan dari orang tua itu berdasarkan hasil rapat keputusan orang tua siswa apa-apa yang ingin dibiayai.⁵⁵

Senada dengan hal diatas bendahara sekolah juga mengatakan bahwa,

Prosedur pelaksanaan pembiayaan pendidikan pada setiap program kegiatan itu dilaksanakan sesuai juknis, dimana kita selaku bendahara menyerahkan rencana anggaran kegiatan kepada kepala sekolah, selanjutnya kepala sekolah menginstruksikan bendahara untuk mencairkan, adanya orientasi sebelum melaksanakan pembiayaan ini guna untuk memberi kode barang dan didaftar sebagai aset sekolah.⁵⁶

⁵⁴Fitriadi, *wawancara* bendahara sekolah SMKN 4 Majene, pada tanggal 06 Juni 2023

⁵⁵ Muhammad Nasru, S.Pd., M.M, *wawancara* kepala sekolah SMKN 4 Majene, pada tanggal 06 Juni 2023

⁵⁶Fitriadi, *wawancara* bendahara sekolah SMKN 4 Majene, pada tanggal 06 Juni 2023

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan pembiayaan ini dilaksanakan sesuai juknis dan disusun dalam RKAS yang dimaksudkan agar semua belanja barang dan jasa terdata dan teradministrasi untuk dijadikan sebagai bahan laporan pertanggung jawaban bagi pengelola sekolah kepada pemerintah.

Sekolah dengan pembiayaan pendidikan yang memadai dan mencukupi akan mampu untuk mendorong terlaksananya sebuah kegiatan operasional sekolah dan diharapkan mampu akan mampu meningkatkan mutu dan kualitas sekolah, baik dari siswa maupun guru, hal ini sama seperti yang ungkapkan oleh salah satu guru yang ada disana bahwa

Dengan adanya pembiayaan yang bersumber dari dana BOS, berusaha untuk menghasilkan yang maksimal sehingga mutu pendidikan dapat tercapai.⁵⁷

Serupa dengan hal diatas Muhammad Nasru selaku kepala sekolah juga menambahkan bahwa

Dengan biaya operasional sekolah yang hanya mencukupi standar minimal yang berdasar pada efisiensi penggunaan dana BOS, sekolah ini berupaya untuk bisa menghasilkan hasil yang optimal meski anggarannya itu minim.⁵⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan mutu dengan pembiayaan pendidikan bersumber dari dana BOS yang meskipun anggarannya minim, sekolah tetap berusaha dan berupaya menghasilkan hasil yang maksimal agar mutu pendidikan dapat tercapai.

Sebuah pelaksanaan anggaran pembiayaan pendidikan tidak akan berjalan tanpa adanya sebuah tim pelaksana yang mengelola di dalamnya hal ini serupa dengan apa yang di ungkapkan oleh kepala sekolah bahwa

⁵⁷ Muhammad Nasru, S.Pd., M.M, *wawancara* kepala sekolah SMKN 4 Majene pada tanggal 06 Juni 2023

⁵⁸ Fitriadi, *wawancara* bendahara sekolah SMKN 4 Majene pada tanggal 06 Juni 2023

Anggaran kewenangan disekolah untuk melaksanakan penggunaan anggaran pembiayaan pendidikan, kewenangannya disekolah itu adalah kepala sekolah yang menetapkan dan dikelola oleh tim penanggung jawab masing-masing yang telah di tetapkan.⁵⁹

Hal serupa juga diungkapkan oleh bendahara sekolah yang mengatakan bahwa

Dalam melaksanakan anggaran pembiayaan pendidikan yang berwenang ialah kepala sekolah dengan memberikan pertanggung jawaban kepada masing-masing delegasi yang merupakan tim belanja, sesuai tugas pokok yang telah ditetapkan.⁶⁰

Dalam hal pertanggung jawaban penggunaan anggaran pembiayaan pendidikan di sekolah, membuat laporan pertanggung jawaban pendapatan dan penggunaan keuangan kepada pemerintah, yang di lakukan secara berkah dan proses transparan. Dari hasil wawancara dari narasumber yakni kepala sekolah mengatakan bahwa

Pertanggung jawaban pelaksanaan pembiayaan pendidikan di sekolah ialah kepala sekolah itu sendiri jadi semua kegiatan yang ada di sekolah itu kepala sekolah adalah penanggung jawabnya. Baik itu dana, proses belajar mengajar. Tetapi kalau diluar dari sekolah yang bertanggung jawab itu adalah dinas pendidikan dan provinsi.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan bendahara sekolah mengatakan bahwa

Kalau masalah pertanggung jawabannya pelaksanaan pembiayaan pendidikan di sekolah itu yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah, dia yang menangani segala macam kegiatan sekolah tapi kita juga sebagai guru ikut membantu.

⁵⁹ Muhammad Nasru, S.Pd., M.M, *wawancara* kepala sekolah SMKN 4 Majene pada tanggal 06 Juni 2023

⁶⁰ Fitriadi, *wawancara* bendahara sekolah SMKN 4 Majene pada tanggal 06 Juni 2023

⁶¹ Muhammad Nasru, S.Pd., M.M, *wawancara* kepala sekolah SMKN 4 Majene, pada tanggal 06 Juni 2023

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan pembiayaan pendidikan itu adalah kepala sekolah itu sendiri. Namun jika di luar daripada sekolah yang bertanggung jawab ialah dinas pendidikan dan provinsi.

Pada hakekatnya untuk merealisasikan pembiayaan sesuai perencanaan yang telah di tetapkan terkadang masih ada pengeluaran yang tidak masuk dalam RKAS, seperti pengeluaran operasional sekolah, kegiatan ekstra di luar sekolah yang tidak membebankan pada siswa.

Berdasarkan hal diatas Kepala sekolah SMKN 4 Majene menjelaskan bahwa

Banyak pembiayaan tak terduga di sekolah dan itulah yang menjadi kendala misalnya ada kegiatan ekstra yang kita programkan tiba-tiba ada undangan kegiatan di luar dari sekolah misalnya dari dinas pendidikan.⁶²

Bendahara sekolah juga menambahkan bahwa

Ada biasanya pembiayaan tidak terduga kalau ada sebuah kebutuhan yang tidak tercantum didalam RKAS maka pembiayaan di dapat dari peminjaman stakeholder lainnya.⁶³

Dari uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat banyak pembiayaan tidak terduga dan itu menjadi sebuah kendala yang dihadapi oleh sekolah sehingga terdapat peminjaman dari stakeholder lainnya. Adanya kekurangan dalam pembiayaan dengan pengeluaran yang tidak terduga akan menjadikan kedewasaan dan kewaspadaan dalam mendesain anggaran pembiayaan pendidikan di sekolah.

⁶² Muhammad Nasru, S.Pd., M.M, *wawancara* kepala sekolah SMKN 4 Majene, pada tanggal 06 Juni 2023

⁶³ Fitriadi, *wawancara* bendahara sekolah SMKN 4 Majene, pada tanggal 06 Juni 2023

3. Evaluasi (*auditing*) pembiayaan pendidikan di SMKN 4 Majene dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan

Persepsi mengenai *auditing* bagi SMK Negeri 4 Majene ini merupakan salah satu kegiatan yang memiliki fungsi dalam mengendalikan atau memonitoring pelaksanaan pembiayaan pendidikan di sekolah.

Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah mengungkapkan dan memberikan penjelasan bahwa

Auditing itu merupakan kegiatan yang berfungsi untuk mengontrol semua proses pelaksanaan pembiayaan pendidikan yang sedang berlangsung di sekolah yang berdasarkan pada 8 standar nasional pendidikan guna mengetahui sejauh mana keberhasilannya.⁶⁴

Hal serupa juga diungkapkan oleh bendahara sekolah yang mengatakan bahwa

Auditing ini adalah proses pemeriksaan keuangan sekolah dengan mencocokkan besar penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.⁶⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi atau auditing adalah suatu kegiatan pengontrolan dan proses pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk mengukur sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh sekolah.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pendidikan di sekolah terdapat teknik audit atau pemeriksaan yang dipergunakan dalam melaksanakan praktek pengawasan di bidang pengelolaan pembiayaan pendidikan. Seperti yang dijelaskan oleh kepala sekolah bahwa

Auditing pembiayaan di sekolah terutama dana BOS kita di audit oleh dinas pendidikan di provinsi kemudian di audit oleh inspektorat yang selanjutnya di audit oleh PPKP dan setelah itu dilaporkan ke dinas untuk dijadikan sebagai

⁶⁴ Muhammad Nasru, S.Pd., M.M, wawancara kepala sekolah SMKN 4 Majene, pada tanggal 06 Juni 2023

⁶⁵ Fitriadi, wawancara bendahara sekolah SMKN 4 Majene, pada tanggal 06 Juni 2023

laporan pertanggung jawaban dan laporan tersebut dibuat oleh sekolah.⁶⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bendahara sekolah Fitriadi juga menambahkan bahwa

Pelaksanaan auditing itu dilakukan setiap satu tahun sekali oleh dinas pendidikan yang ada di provinsi kemudian dijadikan pertanggung jawaban nantinya.⁶⁷

Dari hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk evaluasi pembiayaan disekolah diaudit oleh dinas pendidikan di provinsi yang dilakukan setiap tahun sekali untuk memperoleh tingkat akuntabilitas yang ingin dicapai

Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembiayaan pendidikan di sekolah, dapat dilihat dari terealisasinya anggaran dan seluruh program kegiatan yang ada disekolah dan hasil prestasi siswa. Hal ini serupa dengan yang diungkapkan oleh kepala sekolah bahwa

Cara mengukur keberhasilan pembiayaan itu kita lihat dari outputnya seberapa banyak biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak sekolah dari sisi serap anggaran yang artinya dana yang telah digunakan dan kegiatan yang telah dilaksanakan.⁶⁸

Hal serupa juga diungkapkan oleh bendahara sekolah bahwa

Keberhasilan pembiayaan pendidikan dapat dilihat jika penyerapan anggaran pembiayaan mencapai 100% dan tepat sasaran, keberhasilan ini diukur dari siswa yang terlayani dengan baik dan juga diukur dari pembiayaan pendidikan yang telah direncanakan dapat memenuhi kebutuhan sekolah dan seluruh biaya anggaran habis dalam satu tahun.⁶⁹

Berdasarkan dari uraian diatas dapat simpulkan bahwa dalam mengukur keberhasilan pembiayaan dilihat dari sebagaimana hasil output dan penyerapan anggarannya apakah sesuai apa yang telah diharapkan dan dana

⁶⁶ Muhammad Nasru, S.Pd., M.M, *wawancara* kepala sekolah SMKN 4 Majene pada tanggal 06 Juni 2023

⁶⁷ Fitriadi, *wawancara* bendahara sekolah SMKN 4 Majene, pada tanggal 06 Juni 2023

⁶⁸ Muhammad Nasru, S.Pd., M.M, *wawancara* kepala sekolah SMKN 4 Majene, pada tanggal 06 Juni 2023

⁶⁹ Fitriadi, *wawancara* bendahara sekolah SMKN 4 Majene, pada tanggal 06 Juni 2023

tersebut telah dialokasikan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan sekolah.

Evaluasi dalam pembiayaan ditujukan agar semua proses kegiatan pembiayaan berjalan tanpa penyimpangan, dan sebagai tindakan pencegahan kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan pembiayaan sekaligus mengevaluasi rencana anggaran pendapatan sekolah agar desain sebelumnya dapat digunakan untuk tahun berikutnya, tentunya dengan perubahan dan penambahan program sekolah yang diperlukan sesuai kebutuhan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah menyatakan bahwa

Hasil evaluasi pembiayaan pendidikan ini tentunya berindikasi pada pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga sekolah mengumumkan rencana pengelolaan keuangan ini dapat diketahui dengan mudah oleh semua pemangku kepentingan sekolah dengan model RAPBS tahun ini bisa digunakan untuk pedoman tahun berikutnya tentunya dengan perbaikan program, dan evaluasi dilakukan setiap tahun ajaran berakhir yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru-guru lainnya.⁷⁰

Serupa dengan hal di atas bendahara sekolah juga menambahkan bahwa

Hasil evaluasi dalam model pembiayaan sekolah ini akan digunakan untuk tahun berikutnya tetapi dengan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan program yang disekolah.⁷¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi atau auditing sekolah disana memiliki model pembiayaan yang dapat digunakan setiap tahunnya dengan memperbaiki dan menyempurnakan program yang ada disekolah.

⁷⁰ Muhammad Nasru, S.Pd., M.M, wawancara kepala sekolah SMKN 4 Majene, pada tanggal 06 Juni 2023

⁷¹ Fitriadi, wawancara bendahara sekolah SMKN 4 Majene, pada tanggal 06 Juni 2023

4. Mutu Layanan Pendidikan di SMKN 4 Majene

Mutu layanan pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi lembaga pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi kepuasan dan harapan pelanggan.. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah menyatakan bahwa

Untuk mutu pendidikan kita selalu berupaya terus meningkatkan salah satunya yaitu indikator tingkat kelulusannya, nilai rata-ratanya, kemudian indikator keberhasilan yang bisa kita dari seberapa banyak yang masuk kedalam perguruan tinggi yang ternama. Yang kedua karna sekolah ini SMK kita melakukan tracer study penelusuran tambahan, sudah berapa banyak yang kerja, sudah berapa banyak yang lanjut dan berapa banyak yang menganggur. Hasilnya sekarang ini kita masih berada di posisi tengah, nah ini kita upayakan agar nanti hasilnya bisa maksimal dan itu juga dilihat dari hasil LKS.⁷²

Dalam memenuhi standar pelayanan mutu sekolah selalu berupaya untuk dapat menghasilkan tujuan yang lebih maksimal. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah bahwa

Upaya dalam memenuhi standar pelayanan mutu kita selalu berupaya dengan membuat meeting bersama dengan guru-guru untuk melakukan pelayanan yang maksimal. Kita upayakan pelayanan terhadap siswa itu harus baik maupun pelayanan terhadap stakeholder lainnya.⁷³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa layanan mutu pendidikan di SMKN 4 Majene ini masih perlu ditingkatkan agar dapat mencapai hasil yang maksimal dengan upaya mengadakan meeting bersama oleh para guru-guru agar masyarakat sekolah maupun stakeholder lainnya mendapatkan kepuasan.

C. Pembahasan

Berdasarkan paparan data mengenai konsep manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMKN 4 Majene disimpulkan dengan temuan yang meliputi :

⁷² Muhammad Nasru, S.Pd., M.M, *wawancara* kepala sekolah SMKN 4 Majene, pada tanggal 06 Juni 2023

⁷³ Nurdin S. Ag, *wawancara* wakil kepala sekolah SMKN 4 Majene, pada tanggal 06 Juni 2023

1. Perencanaan pembiayaan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMK Negeri 4 Majene

Perencanaan pembiayaan merupakan salah satu faktor penunjang dalam menentukan keberhasilan suatu pendidikan. Pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam berlangsungnya proses pendidikan. Proses pembelajaran disekolah akan berjalan dan terlaksana secara maksimal apabila tujuan yang akan dicapai memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perencanaan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa perencanaan pembiayaan di sekolah sangatlah penting karena mempengaruhi semua program kegiatan yang akan dilaksanakan serta untuk memenuhi kebutuhan yang ada disekolah. Perencanaan pembiayaan disini merupakan suatu awal dalam menentukan untuk melakukan penyusunan pembiayaan untuk mencapai tujuan sekolah secara maksimal. Hal ini dipertegas oleh Ismail Solihin bahwa perencanaan sebagai suatu aktivitas yang bertujuan untuk penetapan pada awal dilakukannya kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan pada masa yang akan datang.⁷⁴

Kegiatan perencanaan pembiayaan di SMKN 4 Majene ini yaitu dengan menyusun rencana kegiatan anggaran sekolah atau di sebut dengan RKAS yang disusun setiap tahun dengan melibatkan para guru dengan melihat pada fakta yang ada dilapangan tentang apa-apa saja yang perlu dibenahi untuk kegiatan yang akan diprogramkan. Berdasarkan hasil penelitian, RKAS berisikan tentang rangkaian mengenai seluruh aktivitas atau program-program sekolah selama satu tahun serta jumlah anggarannya setiap unit. Sumber biaya pada RKAS hanya bersumber dari negara. Penjabaran tersebut menampilkan perencanaan umum pembiayaan sekolah dari pengelolaan dana BOS. Implementasi ini sesuai dengan pandangan bahwa anggaran berperan sebagai alat untuk perencanaan juga sebagai alat bantu bagi

⁷⁴ Ismail Solihin, *Manajemen Strategik*, (Bandung: Penerbit Erlangga) hlm. 5

manajemen untuk mengarahkan lembaga pada pelaksanaan kegiatannya. RKAS yang sudah dirumuskan bersama, merupakan acuan pelaksanaan pembiayaan di SMKN 4 Majene.

Pengembangan kualitas pendidikan tidak dapat terlepas dari problematika pembiayaan. Oleh karena itu, kepala sekolah selaku pemimpin sekaligus pengawas harus bisa memanfaatkan kesempatan yang ada dan memiliki taktik terbaik dalam mengambil setiap keputusan. Kepala sekolah harus mampu mengeksplor potensi sekolah dan mampu menangani kekurangan dan hambatan sekolah dapat di implementasikan dengan baik.

2. Pelaksanaan (*accounting*) Pembiayaan Pendidikan di SMKN 4 Majene dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁷⁵ Pelaksanaan pembiayaan pendidikan di sekolah dilaksanakan berdasarkan rencana yang disusun sesuai dengan rencana anggaran pembiayaan dan belanja sekolah atau yang disebut dengan RABS untuk memenuhi kebutuhan yang ada di sekolah.

Penguatan fungsi manajemen pendidikan diharapkan mampu menggerakkan mindset pelaksananya. Berdasarkan pada data lapangan dan data teori peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan di SMKN 4 Majene dilaksanakan berdasarkan juknis dan disusun dalam RKAS yang dimaksudkan agar semua belanja barang dan jasa terdata dan teradministrasi untuk dijadikan sebagai bahan laporan pertanggung jawaban bagi pengelola sekolah.

⁷⁵ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70.

3. Evaluasi (*auditing*) Pembiayaan Pendidikan di SMKN 4 Majene dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan

Tahap terakhir dalam sebuah manajemen pembiayaan adalah tahap pengawasan dan evaluasi atau biasa juga disebut dengan penilaian akhir terhadap apa yang telah dilakukan. Tahap evaluasi ini digunakan sebagai pertanggung jawaban terhadap usaha yang telah dicapai. Pertanggung jawaban merupakan suatu penentu dan pembuktian bahwa apa yang telah direncanakan apakah sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Dalam kajian ilmu manajemen, evaluasi merupakan kegiatan controlling untuk mencocokkan apakah kegiatan yang telah dilaksanakan dilapangan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan dari kegiatan itu sendiri. Pengawasan pembiayaan untuk memastikan proses penggunaan data dalam pengelolaan keuangan sudah berjalan dengan baik dan sesuai. Melalui adanya kegiatan evaluasi ini maka dapat ditemukan kekurangan dan kelebihan suatu program, problematika yang dihadapi dan tantangan yang mengancam program selanjutnya.

Berdasarkan dari data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pengevaluasian yang di lakukan di SMKN 4 Majene dengan mengaudit pembiayaan sekolah yang dimana pengauditan tersebut dilakukan oleh dinas pendidikan di provinsi setiap tahun sekali untuk memperoleh tingkat akuntabilitas yang ingin dicapai. Pengawasan pembiayaan di SMKN 4 Majene ini memiliki model pembiayaan yang selalu dapat digunakan untuk setiap tahunnya tapi dengan perbaikan dan penyempurnaan.

4. Mutu Layanan Pendidikan di SMKN 4 Majene

Seiring dengan adanya tuntutan lulusan lembaga pendidikan yang pendidikan yang bermutu, bersamaan dengan perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan yang besar dan kompleks, merupakan konsekuensi yang dapat dihindari dalam perkembangan kehidupan saat ini. Untuk itu, tugas lembaga pendidikan untuk peningkatan daya saing lulusan serta produk-produk akademik lainnya merupakan

suatu hal yang mutlak dibutuhkan, antara lain dapat dicapai melalui peningkatan mutu pendidikan.

Berdasarkan hal diatas dan dari hasil data penelitian menunjukkan bahwa mutu pendidikan di SMKN 4 Majene ini masih berada pada skala menengah dilihat dari mutu lulusannya yang masih perlu ditingkatkan dengan memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik salah satunya dalam proses belajar mengajar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di SMKN 4 Majene dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan pembiayaan pendidikan yang ideal menurut peneliti dilakukan dengan menetapkan rencana yang menjadi prioritas, mengacu pada peraturan pemerintah, perhitungan cermat, mengoptimalkan sumber dana dan diformulasikan dengan jelas agar kelak tidak muncul pembiayaan tidak terduga. Pendistribusiannya mengkomodir kebutuhan siswa dan memaksimalkan fungsi manajemen perencanaan.
2. Pelaksanaan pembiayaan di SMKN 4 Majene dilakukan dalam satu kali setahun dengan berpedoman pada juknis yang disusun dalam RKAS. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan yang ideal menurut peneliti dilakukan dengan mengoptimalkan besarnya anggaran pembiayaan agar tidak terjadi peminjaman dari pihak eksternal dan dapat menghasilkan hasil yang maksimal.
3. Pengevaluasian pembiayaan pendidikan di SMKN 4 Majene dilakukan dengan auditing yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan provinsi kemudian di audit oleh inspektorat dan dilaporkan sebagai laporan pertanggung jawaban. Pengawasan yang ideal apabila hasil pengevaluasian yang telah dilakukan dapat dinilai, dibandingkan, dan di evaluasi untuk di rekomendasikan guna perbaikan proses dimasa mendatang. Pengawasan yang baik apabila produknya dapat di aplikasikan untuk meningkatkan penyerapan anggaran dan mutu sekolah.

4. Mutu pendidikan di SMKN 4 Majene dalam kenyataannya masih perlu dibenahi dan selalu berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan yang maksimal demi kepuasan pelanggan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk kepala sekolah diharapkan mampu mengoptimalkan program yang lebih baik agar kualitas layanan mutu pendidikan di SMKN 4 Majene agar dapat maju dan berkembang
2. Untuk tenaga pendidik dan maupun kependidikan yang diamati untuk mengelola suatu program dan dapat memanfaatkan anggaran biaya sebaik dan semaksimal mungkin dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip manajemen pembiayaan (keterbukaan, responsibilitas, efektivitas, dan efesiensi) dalam perencanaan hingga pelaporannya.
3. Untuk peneliti lain diharapkan mampu mengkaji faktor lain yang berkontribusi pada pengembangan mutu sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Akdon, et.al. “Manajemen Pembiayaan Pendidikan”. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 2015.
- Anggraini. “Kompetensi Pedagogik Guru PAI di SMP Negeri 1 Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir”. *UIN Raden Fatah Palembang*, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. “Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik”. *Jakarta: Rineka Cipta*, 2002.
- Armida. “Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia”. *Media Akademika Fakultas Adab : IAIN Sulthan Thaha*, Vol. 26, No.1, 2011.
- Brigham, Eugene F. “Fundamentals Of Financial Management, 15th Edition”. *Cengage Learning: Boston*, 2019.
- Danim, Sudarwan. “Visi Baru Manajemen Sekolah; Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik”. *Jakarta: Bumi Aksara*, 2008.
- Damin, Sudarman. “Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora”. *Bandung: Pustaka setia*, 2012.
- Djaelani, Aunu Rofiq. “Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif”. *Majalah Ilmiah Pariwisata* 20. 1, 2013.
- Fattah, Nanang. “Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan”. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 2003.
- Fattah, Nanang. “Standar Pembiayaan Pendidikan”. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 2012.
- Fattah, Nanang. “Landasan Manajemen Pendidikan”. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 2013.
- Hamalik, Oemar. “Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum”. *Bandung: Remaja Roasda Karya*, 2007.
- Jahari, Jaja dan Amirullah Syarbini. “Manajemen Madrasah Teori, Strategi dan Implementasi”. *Bandung: Penerbit Alfabeta*, 2013.

- Kementerian Agama RI. "Ar-Rahim Al-Qur'an dan Terjemahan". *Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu*.
- Kisbiyanto. "Pengektifan Manajemen Pendidikan". *Jurnal Pendidikan*, Vol 2 No. 1, 2014.
- Manullang. "Dasar-dasar Manajemen". *Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI)*, 2008.
- Maswan. "Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah". *Jurnal Tarbawi*, 2015.
- Mas'ud, Abdurrahman. "Paradigma Pendidikan Islam". *Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset*, 2001.
- Mulyasa, E. "Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep Strategi dan Implementasi". *Bandung: PT Remaja Rosda Karya*, 2004.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif". *Bandung: Remaja Rosda Karya*, 2002.
- Rusdiana, A. & A. Gojin. "Asas-Asas Manajemen: Berwawasan Global". *Bandung: Pustaka Setia*, 2014.
- Rohiat. "Manajemen Sekolah; Teori dan Praktek". *Bandung: Refika Aditama*, 2009.
- Salis, Edward. "Total Quality Mangement in Education". *Yogyakarta*, 2006.
- Siagan, Sondang P. "Manajemen Modern". *Jakarta: Gunung Agung*, 1996.
- Sintuari, Efendi dkk. "Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan". *Sidoarjo: Zifatama Jawara*, 2020.
- Suwarni. "Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Dehasen Bengkulu". *Jurnal Bisnis*, 3.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". *Bandung: CV Alfabeta*, 2010.
- Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". *Bandung: CV Alfabeta*, 2013.
- Todaro, M., & Smith, S.C. "Economic Develoment. In Economic Develoment (1th ed; D. Battista, Ed)". *Amerika Serikat: Pearson UK*, 2011.
- Usman, Nurdin. "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum". *Jakarata: PT. Raja Grafindo Persada*, 2002.
- Parrish, Thomas B. et.al. "State Education Finance System". *California: American Institute for Research*, 2009.

Wasilah, A. Chaedar Al. “Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif”. *Jakarta: Pustaka Jaya*, 2011.

Yuniarto, Mudjisusatyo et al., “Education Financing Management During the COVID-19 Pandemic at the Madrasah Tsanawiyah Level : Exploration of Alternative Solutions, *Journal of Education, Teaching, and Learning*, 2023.

Zubair, Muhammad Kamal. “Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi”. *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2021.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

	<p align="center">KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE FAKULTAS TARBIYAH Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Faksimile (0421) 24404</p>
	<p align="center">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : MIRNA
 NIM/PRODI : 19.1900.055/MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
 FAKULTAS : TARBIYAH
 JUDUL : MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM
 MENINGKATKAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN
 (STUDI KASUS DI SMKN 4 MAJENE)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana persepsi mengenai persiapan perencanaan pembiayaan SMKN 4 Majene?
2. Bagaimana metode perencanaan pembiayaan pendidikan di SMKN 4 Majene?
3. Bagaimana proses perencanaan pembiayaan pendidikan di SMKN 4 Majene?
4. Bagaimana persepsi mengenai pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SMKN 4 Majene?
5. Kapan pelaksanaan pembiayaan pendidikan dilakukan?
6. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SMKN 4 Majene?
7. Siapa saja pemangku kewenangan dalam melaksanakan anggaran pembiayaan pendidikan di SMKN 4 Majene?
8. Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SMKN 4 Majene?
9. Apakah ada pembiayaan tidak terduga di SMKN 4 Majene?
10. Bagaimana persepsi mengenai evaluasi (auditing) di SMKN 4 Majene?

11. Bagaimana bentuk evaluasi (auditing) pembiayaan di SMKN 4 Majene?
12. Bagaimana cara mengukur keberhasilan pembiayaan pendidikan?
13. Bagaimana hasil evaluasi pembiayaan dan siapa saja pihak yang melakukan pengevaluasian
14. Bagaimana mutu pendidikan yang ada di SMKN 4 Majene?
15. Upaya apa yang dilakukan dalam memenuhi standar pelayanan mutu di SMKN 4 Majene?

Parepare, 30 Januari 2023

Mengetahui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Drs. Ismail Latif, M.M
NIP. 196312071987031003

Humaeroah, M.Pd
NIDN. 2021089101

PAREPARE

Lampiran 2

Nama : Muhammad Nasru, S.Pd, MM

Jabatan : Kepala sekolah

Pewawancara : “Bagaimana persepsi mengenai perencanaan pembiayaan di SMKN 4 Majene di SMKN 4 Majene?”

Narasumber : “Ada delapan standar nasional pendidikan itu salah satunya standar pembiayaan. Nah untuk pembiayaan ini memang sangat penting karna semua kegiatan bisa berjalan dengan baik apabila di topang oleh dana yang memadai tetapi bukan berarti, jika tidak ada dana kegiatan sekolah tidak dapat berjalan, tetapi tetap kita upayakan dan usahakan bagaimana agar bisa berjalan. Rencana biaya ini adalah kebutuhan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah kita rumuskan biaya operasionalnya.”

Pewawancara : “Bagaimana metode perencanaan pembiayaan di SMKN 4 Majene?”

Narasumber : “Pembiayaan di SMKN 4 Majene ini menyusun yang namanya RKAS Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah setiap tahun itu di susun bersama dengan guru apa-apa yang perlu di benahi yang akan diprogramkan. RKAS itu secara aplikasi yang dikirim ke kementerian.”

Pewawancara : “Bagaimana proses perencanaan pembiayaan pendidikan di SMKN 4 Majene?”

Narasumber : “Disini kita melaksanakan proses perencanaan dengan berbagai upaya untuk menata sekolah ini. Langkah-langkah tersebut kami laksanakan dengan menganalisa permasalahan yang ada bersama dengan tim

sekolah baik itu dari segi manajerial, keuangan, administrasi, layanan dan lain sebagainya, dan juga kita melakukan konsultasi bersama dengan stakeholder lainnya agar diberikan solusi terbaik dalam problematika atau masalah yang ada. Disini kita berupaya melakukan yang terbaik dalam mengelola seklolah ini.”

Pewawancara : “Bagaimana persepsi mengenai pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SMKN 4 Majene?”

Narasumber : “Pelaksanaan itu merupakan suatu kegiatan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rencana anggaran sekolah itu untuk dilaksanakan yang dimana guna memenuhi kebutuhan sekolah dalam rangka manajemen pembiayaan sekolah.”

Pewawancara : “Kapan pelaksanaan pembiayaan pendidikan dilakukan?”

Narasumber : “Pelaksanaan pembiayaan sepanjang tahun itu cair dalam setahun sekali tetapi terkadang kita punya kendala yang direncanakan itu dana yang sudah disiapkan terkadang membengkak karna biasanya dana belum cair kita sudah melaksanakan kegiatan, makanya disekolah ini terkadang ada peminjaman dari pihak lain karna dana BOS itu biasanya tidak tepat cair.

Pewawancara : “Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SMKN 4 Majene?”

Narasumber : “Prosedur pelaksanaan pembiayaan pendidikan kalau dana BOS berdasarkan juknis dari kementerian, di juknis ini ada petunjuk teknismya tentang apa-apa yang perlu dibiayai tidak boleh keluar dari itu, dan itu harus di susun di RKAS di elektroniknya di dalam aplikasi. Tapi kalau dana lain misalnya sumbangan dari orang tua itu berdasarkan hasil rapat keputusan orang tua siswa apa-apa yang ingin dibiayai.”

Pewawancara : “Siapa saja pemangku kewenangan dalam melaksanakan anggaran pembiayaan pendidikan di SMKN 4 Majene?”

Narasumber : “anggaran kewenangan disekolah untuk melaksanakan penggunaan anggaran pembiayaan pendidikan, kewenangannya disekolah itu adalah kepala sekolah yang menetapkan dan dikelola oleh tim penanggung jawab masing-masing yang telah di tetapkan.”

Pewawancara : “Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SMKN 4 Majene?”

Narasumber : “pertanggung jawaban pelaksanaan pendidikan di sekolah ialah kepala sekolah itu sendiri jadi semua kegiatan yang ada di sekolah itu kepala sekolah adalah penanggung jawabnya. Baik itu dana, proses belajar mengajar. Tetapi kalau diluar dari sekolah yang bertanggung jawab itu adalah dinas pendidikan dan provinsi”

Pewawancara : “Apakah ada pembiayaan tidak terduga di SMKN 4 Majene?”

Narasumber : “Banyak pembiayaan tak terduga di sekolah dan itulah yang menjadi kendala misalnya ada kegiatan ekstra yang kita programkan tiba-tiba ada undangan kegiatan di luar dari sekolah misalnya dari dinas pendidikan”

Pewawancara : “Bagaimana persepsi mengenai evaluasi (auditing) pembiayaan di SMKN 4 Majene?”

Narasumber : “auditng itu merupakan kegiatan yang berfungsi untuk mengontrol semua proses pelaksanaan pembiayaan pendidikan yang sedang berlangsung di sekolah yang berdasarkan pada 8 standar nasional pendidikan guna mengetahui sejauh mana keberhasilannya”

Pewawancara : “Bagaimana bentuk evaluasi (auditing) di SMKN 4 Majene?”

Narasumber : “auditing pembiayaan di sekolah terutama dana BOS kita di audit oleh dinas pendidikan di provinsi kemudian di audit oleh inspektorat yang selanjutnya di audit oleh PPKP dan setelah itu dilaporkan ke

dinas untuk dijadikan sebagai laporan pertanggung jawaban dan laporan tersebut dibuat oleh sekolah.”

Pewawancara : “Bagaimana cara mengukur keberhasilan pembiayaan pendidikan?”

Narasumber : “Cara mengukur keberhasilan pembiayaan itu kita lihat dari outputnya seberapa banyak biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak sekolah dari sisi serap anggaran yang artinya dana yang telah digunakan dan kegiatan yang telah dilaksanakan.”

Pewawancara : “Bagaimana hasil evaluasi pembiayaan dan siapa saja pihak yang melakukan pengevaluasian?”

Narasumber : “Hasil evaluasi pembiayaan pendidikan ini tentunya berindikasi pada pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sehingga sekolah mengumumkan rencana pengelolaan keuangan ini dapat diketahui dengan mudah oleh semua pemangku kepentingan sekolah dan model RAPBS tahun ini bisa digunakan untuk pedoman tahun berikutnya tentunya dengan perbaikan program, dan evaluasi dilakukan setiap tahun ajaran berakhir yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru-guru lainnya.”

Pewawancara : “Bagaimana mutu pendidikan yang ada di SMKN 4 Majene?”

Narasumber : “Untuk mutu pendidikan kita selalu berupaya terus meningkatkan salah satunya yaitu indikator tingkat kelulusannya, nilai rata-ratanya, kemudian indikator keberhasilan yang bisa kita dari seberapa banyak yang masuk kedalam perguruan tinggi yang ternama. Yang kedua karna sekolah ini SMK kita melakukan tracer study penelusuran tambahan, sudah berapa banyak yang kerja, sudah berapa banyak yang lanjut dan berapa banyak yang menganggur. Hasilnya sekarang ini kita masih berada di posisi tengah, nah ini kita upayakan agar nanti hasilnya bisa maksimal dan itu juga dilihat dari hasil LKS”

Pewawancara : “Upaya yang dilakukan dalam memenuhi standar pelayanan mutu di SMKN 4 Majene?”

Narasumber : “Upaya dalam memenuhi standar pelayanan mutu kita selalu berupaya dengan membuat meeting bersama dengan guru-guru untuk melakukan pelayanan yang maksimal. Kita upayakan pelayanan terhadap siswa itu harus baik maupun pelayanan terhadap stakeholder lainnya.”



Nama : Fitriadi

Jabatan : Bendahara sekolah

Pewawancara : “Bagaimana persepsi mengenai perencanaan pembiayaan di SMKN 4 Majene di SMKN 4 Majene?”

Narasumber : “Perencanaan pembiayaan pendidikan itu merupakan suatu proses kegiatan dalam menentukan untuk melakukan suatu kegiatan atau penyusunan pembiayaan di sekolah agar tujuan dan sasaran sekolah dapat dicapai, perencanaan pembiayaan ini merupakan suatu dasar dalam mencapai tujuan sekolah yang semaksimal mungkin.”

Pewawancara : “Bagaimana metode perencanaan pembiayaan di SMKN 4 Majene?”

Narasumber : “Dalam menyusun perencanaan pembiayaan kita punya metode itu salah satunya dengan menyusun apa namanya RKAS untuk dijadikan sebagai acuan kita dalam menggunakan anggaran.”

Pewawancara : “Bagaimana proses perencanaan pembiayaan pendidikan di SMKN 4 Majene?”

Narasumber : “Proses perencanaannya itu kita pertama-pertama menentukan pedoman anggaran dulu kemudian kita mempersiapkan anggaran yang kita susun lalu kemudian barulah kita mengalokasikan dana itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan.”

Pewawancara : “Bagaimana persepsi mengenai pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SMKN 4 Majene?”

Narasumber : “Pelaksanaan ialah proses dalam melaksanakan pembiayaan pendidikan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan RAPBS untuk memenuhi kebutuhan yang ada disekolah.”

Pewawancara : “Kapan pelaksanaan pembiayaan pendidikan dilakukan?”

Narasumber : “Pembiayaan di SMK 4 Majene ini apa namanya cair dalam satu kali setahun dalam kaitannya dengan pelaksanaan memang kita punya kendala misalnya kita sudah melaksanakan kegiatan tapi dananya itu hasil dari pinjaman. Jadi, sekolah kita ini kadang melakukan peminjaman dari luar karna dana BOS belum cair. Nah, disinilah kita berupaya untuk bagaimana kita melaksanakan pembiayaan secara maksimal.”

Pewawancara :”Bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SMKN 4 Majene?”

Narasumber : “Prosedur pelaksanaan pembiayaan pendidikan pada setiap program kegiatan itu dilaksanakan sesuai juknis, dimana kita selaku bendahara menyerahkan rencana anggaran kegiatan kepada kepala sekolah, selanjutnya kepala sekolah menginstruksikan bendahara untuk mencairkan, adanya orientasi sebelum melaksanakan pembiayaan ini guna untuk memberi kode barang dan didaftar sebagai aset sekolah.”

Pewawancara : “Siapa saja pemangku kewenangan dalam melaksanakan anggaran pembiayaan pendidikan di SMKN 4 Majene?”

Narasumber : “dalam melaksanakan anggaran pembiayaan pendidikan yang berwenang ialah kepala sekolah dengan memberikan pertanggung jawaban kepada masing-masing delegasi yang merupakan tim belanja, sesuai tugas pokok yang telah ditetapkan.”

Pewawancara : “Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SMKN 4 Majene?”

Narasumber : “Kalau masalah pertanggung jawabannya pelaksanaan pembiayaan pendidikan di sekolah itu yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah, dia yang menangani segala macam kegiatan sekolah tapi kita juga sebagai guru ikut membantu.”

- Pewawancara : “Apakah ada pembiayaan tidak terduga di SMKN 4 Majene?”
- Narasumber : “Ada biasanya pembiayaan tidak terduga kalau ada sebuah kebutuhan yang tidak tercantum didalam RKAS maka pembiayaan di dapat dari peminjaman stakeholder lainnya.”
- Pewawancara : “Bagaimana persepsi mengenai evaluasi (auditing) pembiayaan di SMKN 4 Majene?”
- Narasumber : “Auditing ini adalah merupakan proses pemeriksaan keuangan sekolah dengan mencocokkan besar penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.”
- Pewawancara : “Bagaimana bentuk evaluasi (auditing) di SMKN 4 Majene?”
- Narasumber : “Pelaksanaan auditing itu dilakukan setiap satu tahun sekali oleh dinas pendidikan yang ada di provinsi kemudian dijadikan pertanggung jawaban nantinya.”
- Pewawancara : “Bagaimana cara mengukur keberhasilan pembiayaan pendidikan?”
- Narasumber : “Keberhasilan pembiayaan pendidikan dapat dilihat jika penyerapan anggaran pembiayaan mencapai 100% dan tepat sasaran, keberhasilan ini diukur dari siswa yang terlayani dengan baik dan juga diukur dari pembiayaan pendidikan yang telah direncanakan dapat memenuhi kebutuhan sekolah dan seluruh biaya anggaran habis dalam satu tahun”
- Pewawancara : “Bagaimana hasil evaluasi pembiayaan dan siapa saja pihak yang melakukan pengevaluasian?”
- Narasumber : “Hasil evaluasi dalam model pembiayaan sekolah ini akan di gunakan untuk tahun berikutnya tetapi dengan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan program yang disekolah.”

Lampiran 3

Surat Rekomendasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS TARBİYAH

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 06 Sorong Parepare 91132 telp 0421) 21307 Fax:24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

- Nomor : B.2034/In.39/FTAR.01/PP.00.9/05/2023 22 Mei 2023
Lampiran : 1 Bundel Proposal Penelitian
Hal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

Yth. Bupati Majene
C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di,-

Kab. Majene

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : Mira
Tempat/Tgl. Lahir : Onang, 1 Oktober 2001
NIM : 19.1900.055
Fakultas / Program Studi : Tarbiyah/ Pendidikan Bahasa Inggris
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Onang, Desa Tubo Sendana, Kec. Tubo Sendana,
Kab. Majene, Prov. Sulbar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kab. Majene dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan (Studi Kasus Di SMKN 4 Majene)". Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai bulan Juni Tahun 2023.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

- 1 Rektor IAIN Parepare
- 2 Dekan Fakultas Tarbiyah

Lampiran 4

Surat Izin Melaksanakan Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPM-PTSP)
Jln. Ammana Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar 

IZIN PENELITIAN
Nomor : 210/IP/DPM-PTSP/MM/V/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/220/V/2023 Tanggal 31 Mei 2020 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a	: MIRNA
Pekerjaan	: Mahasiswi
N I M	: 1919000055
Program Study/Jurusan	: S1 Manajemen Pendidikan Islam
Universitas	: IAIN Pare Pare
Alamat	: Onang Desa Onang Utara Kec. Tubo Sendana Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul **"MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI SMKN 4 MAJENE)"** dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exampilar cofy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
Pada Tanggal : 31-05-2023
Kepala Dinas



Hi. Lies HIRAWATI THAHIR, S.Sos, M.AP
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip. 196809281992032011

Lampiran 5

Surat Selesai Meneliti



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 4MAJENE**



Alamat : Jl. Poros Majene – Mamuju Km 65 Onang Kode Pos 91452 Email:smk4maju@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 2600/072/SMK.04/MN/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMK Negeri 4 Majene kec.Tubo Sendana kab.Majene prov. Sulawesi Barat menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD NASRU,S.Pd.,MM
NIP : 19650320 199103 1 019
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina TK.I,IV/b
Jabatan : Kepala SMK Negeri 4 Majene
Unit Kerja : SMK NEGERI 4 MAJENE

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MIRNA
Nim : 191900055
Fakultas : Tarbiyah
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Tempat kuliah : IAIN Parepare

Demikian ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian mulai pada bulan Mei sampai Juni dengan judul “MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI SMKN 4 MAJENE)” Di SMK Negeri 4 Majene, Kab.Majene, Prov.Sulawesi Barat.

Demikian surat keterangan selesai melaksanakan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 7 Juni 2023
Kepala Sekolah



MUHAMMAD NASRU,S.Pd.,MM
NIP. 19650320 199103 1 019

Lampiran 6

Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

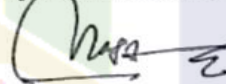
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad. Nizar, S.Pd. MM
Tempat/Tanggal Lahir : Pinarong, 20 - 3 - 1965
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Sekolah
Alamat : Majene

Dengan ini, menyatakan bahwa saya benar telah memberi keterangan wawancara kepada saudara Mirna, Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan (Studi Kasus di SMKN 4 Majene)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 06/ Juni /2023



(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriadi
Tempat/Tanggal Lahir : Majene, 10 Desember 1969
Agama : Islam
Pekerjaan : Bendahara Sekolah
Alamat : Parabaya

Dengan ini, menyatakan bahwa saya benar telah memberi keterangan wawancara kepada saudara Mirna, Mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Manajemen Pembiayaan Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan (Studi Kasus di SMKN 4 Majene)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 07/ Juni /2023


(...Fitriadi...)

PAREPARE

Lampiran 7

Dokumentasi Wawancara Bersama Kepala Sekolah di SMKN 4 Majene (Muhammad Nasru S.Pd, MM)



Dokumentasi Wawancara Bersama Bendahara Sekolah di SMKN 4 Majene

(Fitriadi)



BIODATA PENULIS



Penulis bernama Mirna salah satu mahasiswi IAIN yang lahir pada tanggal 01 Oktober 2001 di Onang Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene anak dari pasangan Bapak Dahlan dan Ibu Darna. Penulis memulai pendidikan sejak usia 5 tahun ke jenjang Taman Kanak-kanak di PAUD Ammana Buya dan lulus pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Dasar di SD No. 33 Inpres Rawang-rawang dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Sendana dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah kejuruan di SMK Negeri 4 Majene dan mengambil jurusan Administrasi Perkantoran dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu penulis

melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di IAIN Parepare. Penulis mengambil jurusan program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan menyusun skripsi dengan judul **“MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU LAYANAN PENDIDIKAN (STUDI KASUS DI SMKN 4 MAJENE)”**